



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**PROGRAM KELOMPOK KERJA SOSIAL EKONOMI  
INDONESIA – MALAYSIA (KK SOSEK MALINDO)  
DI KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA**

**FIRMAN FAHROZI**

**NIM: 120170103009**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam mend apatkan Gelar Magister Ilmu Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR**

**Februari 2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

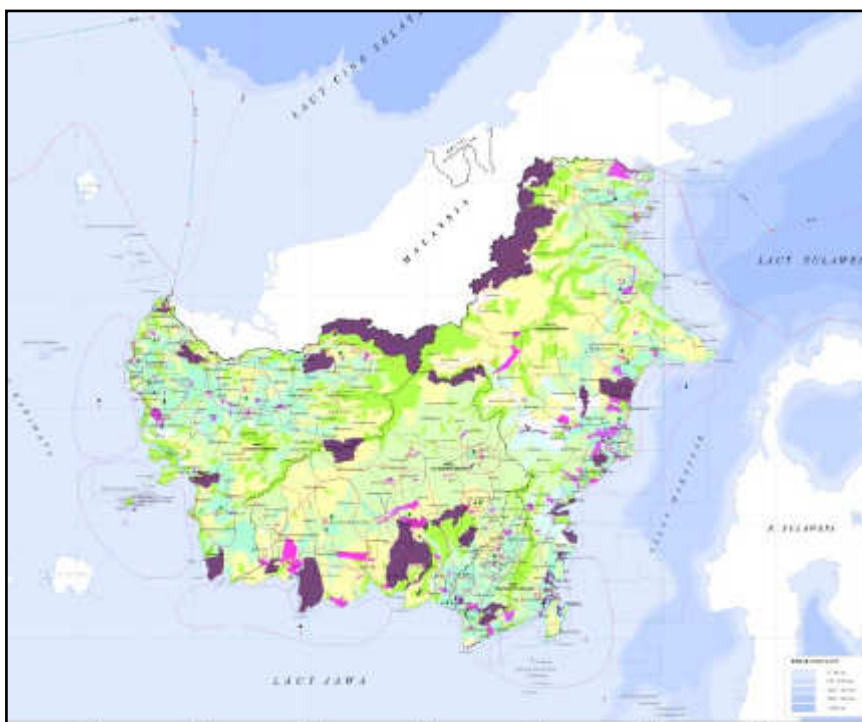
### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara besar yang mempunyai luas wilayah baik di daratan maupun di lautan yang memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan wilayahnya. Wilayah perbatasan suatu negara adalah modal utama kedaulatan suatu negara. Perbatasan negara merupakan lokasi geografis yang berfungsi sebagai pembatas yang didefinisikan oleh suatu negara untuk menentukan teritorinya. Indonesia berbatasan langsung dari perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia di pulau Kalimantan, Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Papua Nugini (PNG) di Provinsi Papua. Sedangkan perbatasan laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Republik Palau, Australia, dan PNG.

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik perbatasan yang rawan akan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara tetangga sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Wilayah perbatasan suatu negara memang sering menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Selama ini, Indonesia paling sering bersengketa mengenai masalah perbatasan dengan Negara Malaysia.

Wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting terhadap penentuan batas wilayah kedaulatan, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, pemanfaatan sumber daya alam. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik dan hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Perbatasan darat Indonesia–Malaysia memiliki panjang garis batas kurang lebih 2004 km yang berbatasan dengan ketiga Provinsi Indonesia (Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur). Mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 48 km, dan Kalimantan Utara sepanjang 990 km yang memisahkan wilayah Indonesia dengan Negeri Sabah dan Sarawak Malaysia serta Kalimantan Barat yang memiliki panjang garis batas sekitar 966 km yang berbatasan dengan Negeri Sarawak Malaysia. Berdasarkan letak geografis wilayah perbatasan di Kalimantan berada antara 109°10' – 114°05' BT dan 0°30' – 2°10' LU,<sup>1</sup> berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).<sup>2</sup>



**Gambar 1.1 Peta Pulau Kalimantan**

Sumber: Badan Koordinasi Penata Ruang Nasional (BKPRN), 2017.

<sup>1</sup> Yuvinus, Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia–Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans–Nasional, *Jurnal Caraka Prabhu*, Volume 01 (01), 2017, hlm. 80.

<sup>2</sup> Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2015, Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 – 2019



**Gambar 1.2 Peta Provinsi Kalimantan Barat**

Sumber: Pemerintah Daerah Prov. Kalimantan Barat, 2017

Penegasan batas bersama perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan telah dimulai sejak tahun 1975. Kemudian pada tahun 2000 pekerjaan demarkasi<sup>3</sup> dan delienasi<sup>4</sup> serta penggambarannya telah selesai, akan tetapi masih terdapat sepuluh lokasi bermasalah atau kedua negara belum sepakat tentang batas negara di lokasi tersebut. Perkembangan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat (Indonesia)–Sarawak (Malaysia) menjadi lebih maju jika dibandingkan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Hal tersebut disebabkan karena Provinsi Kalimantan Barat memiliki hubungan yang lebih intens dengan Negara Malaysia jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur yang sebagian besar daerah perbatasannya masih berupa hutan konservasi.

<sup>3</sup> Menurut KBBI, demarkasi adalah batas pemisah yang biasanya ditetapkan oleh pihak yang sedang bersengketa.

<sup>4</sup> Menurut KBBI, delienasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya).

Kewaspadaan bangsa Indonesia terhadap berbagai pihak dan kepentingan asing harus ditingkatkan oleh semua komponen bangsa. Masyarakat yang ada di wilayah perbatasan, pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah pedalaman Indonesia. Wilayah perbatasan Indonesia yang sangat luas baik di darat maupun di laut tidak dapat terjaga secara keseluruhan dengan optimal oleh aparat keamanan dan pertahanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), imigrasi dan lembaga pemerintahan lainnya karena keterbatasan personil, peralatan, logistik, dan anggaran sehingga hanya beberapa titik koordinat tertentu yang harus mendapatkan prioritas.

Pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola serta menanggulangi permasalahan yang kerap terjadi di perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan dengan diterbitkannya aturan seperti Keppres No.44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan, namun Keppres tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan sehingga pada era pemerintahan Presiden B. J. Habibie Keppres tersebut dicabut dan pengelolaan daerah perbatasan dikembalikan ke instansi terkait.<sup>5</sup>

Wilayah perbatasan negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Hal ini dapat terjadi antara lain karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan suatu negara, dan menjadi aspek pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal diperbatasan mempunyai hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan berbagai interaksi dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lain yang berbatasan.

Secara langsung maupun tidak langsung, hubungan di wilayah perbatasan mempunyai dampak penting terhadap kondisi pertahanan baik dalam skala nasional, bilateral, maupun regional. Kawasan perbatasan

---

<sup>5</sup> Letjen. TNI Moeldoko, "Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia", *Jurnal Pertahanan*, Volume 2, Nomor 3, 2012, hlm. 06.

darat antar negara berpotensi besar bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan dan memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata. Hal tersebut tentu menjadi suatu peluang besar bagi peningkatan kegiatan produksi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat perbatasan itu sendiri.

Masyarakat di wilayah perbatasan yang setiap hari bersentuhan dengan orang asing dari negara yang berbatasan dengan Indonesia tentunya harus meningkatkan kewaspadaan mengingat wilayah perbatasan merupakan pintu masuk bagi berbagai kegiatan ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia. Kewaspadaan yang tinggi dari masyarakat di wilayah perbatasan sangat penting karena karakteristik masyarakat perbatasan tentunya berbeda dengan masyarakat di perkotaan dan pedesaan lainnya.

Masyarakat perbatasan sangat rawan dengan berbagai penetrasi dan infiltrasi asing karena secara geografis langsung bersentuhan dengan negara lain dan secara ekonomi terdapat interaksi atau transaksi ekonomi serta secara sosial kultural terdapat hubungan kekerabatan yang erat. Kompleksitas permasalahan masyarakat di perbatasan sangat rawan disusupi oleh berbagai kepentingan asing yang dapat mengancam persatuan dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perbatasan negara, khususnya Indonesia–Malaysia merupakan salah satu masalah strategis yang perlu untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengarah pada ancaman–ancaman terhadap keamanan negara akibat tingginya mobilitas masyarakat antar kedua negara di sepanjang wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan lautnya.

Masyarakat perbatasan pada umumnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kegiatan lintas batas tersebut. Selain karena faktor kesatuan masyarakat yang memang sudah berinteraksi lama dari sebelum pembentukan batas negara. Faktor perkembangan pembangunan infrastruktur yang lambat dari pusat kota ke daerah pinggiran menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk berinteraksi lintas wilayah batas negara. Seringkali, masyarakat yang tinggal di perbatasan lebih dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi negara tetangga daripada negaranya sendiri.

Terdapat dua inti permasalahan besar di kawasan perbatasan darat Indonesia–Malaysia, yakni menyangkut kedaulatan bangsa dan negara, kemudian masalah kepentingan masyarakat perbatasan itu sendiri. Permasalahan pertama mengenai kedaulatan bangsa dan negara lebih banyak didasarkan pada kasus tapal batas yang sering bergeser dari titik koordinat yang sebelumnya telah disepakati bersama. Pergeseran atas wilayah negara menjadi permasalahan yang cukup krusial. Beberapa kali hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas disebabkan oleh persengketaan tapal batas yang berulang-ulang.

Sedangkan permasalahan kedua yang menyangkut kepentingan masyarakat perbatasan disebabkan oleh ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan Kalimantan Barat. Permasalahan sosial ekonomi ini akan merambat kepada permasalahan meluncurnya rasa nasionalisme sebab melihat tingginya jaminan sosial bagi kehidupan masyarakat negara tetangga. Ketimpangan ini mengakibatkan pada keinginan sebagian warga untuk meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia dan kemudian berpindah menjadi warga negara Malaysia.

Di samping itu, ketidakmerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia, yang berakibat pada kesenjangan sosial antar warga masyarakat kawasan perbatasan maupun masyarakat pendatang. Demikian pula dengan percepatan pembangunan yang tidak melibatkan penduduk setempat

hasilnya tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, bahkan akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat.

Infrastruktur yang berupa jalan tidak disesuaikan dengan konsep pertahanan keamanan ataupun menunjang pengawasan di wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakatnya merasa lebih terbiasa dengan kuasa pemerintahan negara tetangga dan lebih dekat dengan mereka daripada dengan negaranya sendiri yang lebih jauh akibat lambatnya pembangunan. Bahkan lebih yang lebih ironis lagi, masyarakat perbatasan juga sudah terbiasa menggunakan mata uang negara tetangga dalam berinteraksi sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berbagai hal tersebut selalu menjadi peluang ancaman yang menghantui Indonesia dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ditambah lagi dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), perdagangan bebas internasional, kesepakatan dan kerja sama ekonomi, regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa kawasan perbatasan, kontinen maupun maritim, menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan kawasan tersebut.

Terjadi banyaknya pelanggaran yang menyangkut kepentingan pribadi maupun golongan, tidak dapat tertangani dengan baik. Tidak ada kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat setempat, sehingga berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan tanpa ada penanganan yang berarti dari pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan komunikasi serta kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya memupuk rasa persaudaraan di antara masyarakat sebangsa dan setanah air.

Permasalahan yang sangat mendasar inilah yang menyebabkan masyarakat kehilangan kesadaran akan pentingnya integrasi bangsa, pelestarian alam, keselamatan bangsa, dan saling menghargai sesama

umat manusia. Kepentingan ekonomi dapat mengalahkan prinsip berbangsa dan bernegara yang akhirnya akan membahayakan integritas masyarakat di wilayah perbatasan. Berbagai barang ilegal dapat dengan mudah keluar masuk melalui jalur-jalur perbatasan darat yang masih belum dapat diawasi secara maksimal. Bahkan lebih dari itu, dapat ditemukan secara nyata transaksi-transaksi ilegal terjadi di depan aparat yang berwenang. Selain itu, lemahnya infrastruktur (baik alat transportasi, jalan raya, komunikasi, serta lampu penerangan) tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sehingga sangat sering terjadi gangguan yang pada intinya merugikan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Hal lain yang selalu menjadi sorotan permasalahan perbatasan adalah terjadinya *human trafficking* yang disebabkan oleh berbagai alasan, khususnya alasan ekonomi. Pekerjaan yang dijanjikan dari daerah asal mereka, banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak sedikit dari mereka yang dijanjikan pekerjaan layak dengan penghasilan yang sesuai, akan tetapi ironisnya mereka dijual dan dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) secara terpaksa.

Di wilayah ini, penyakit masyarakat tidak hanya disebabkan oleh adanya *human trafficking*, tetapi juga terjadi karena kebanyakan di antara pendatang yang belum mendapatkan pekerjaan kehabisan bekal, sehingga memerlukan biaya hidup. Sementara itu, mereka belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Permasalahan sosial ini pun juga harus mendapatkan perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah.

Demikian pula dengan permasalahan lain seperti fasilitas kesehatan yang seharusnya sangat diperlukan oleh masyarakat, walaupun sudah menjangkau wilayah perbatasan, tetapi masih jauh dari memuaskan. Tidak heran jika masyarakat lebih banyak mempercayakan kondisi kesehatan mereka kepada negara tetangga daripada tenaga kesehatan Indonesia sendiri. Bahkan tidak hanya masyarakat perbatasan saja yang melakukan hal demikian, sebagian masyarakat Kalimantan

Barat yang tidak tinggal diperbatasan pun sering kali lebih memilih berobat ke Negeri Jiran tersebut dengan alasan kualitas pengobatan mereka yang lebih baik.

Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang memiliki Jalur Lintas darat terbanyak dengan Malaysia. Terdapat 13 Pos Lintas Batas (PLB) disepanjang perbatasan darat Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) yaitu Temanjuk, Liku, Sajingan, Siding, Jagoibabang, Saparan, Segumon, Bantan, Jasa, Nanga Bayan, Semarah, Merakai Panjang, Langau. Dan terdapat 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu, PLBN Entikong Kab. Sanggau, PLBN Aruk Kab. Sambas, dan PLBN Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu.<sup>6</sup> PLBN Entikong merupakan jalur lintas “resmi” terbesar dan tertua di Kalimantan Barat, karena PLBN Entikong merupakan pos lintas pertama yang memiliki *Costum, Imigration, Quarantine, and Security* (CIQS). Selain itu, PLBN Entikong adalah jalur yang paling sering digunakan untuk keluar masuk antar kedua negara.

Salah satu isu strategis prioritas pembangunan di Kalimantan Barat adalah infrastuktur, karena Infrastruktur diperkirakan dapat memberikan kemudahan di setiap daerah-daerah untuk berkembang dan memudahkan investor masuk. Pemerintah Kalimantan Barat melakukan pembahasan di setiap tingkat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari desa, kecamatan, daerah, hingga pra musrembang tingkat provinsi dan akan dibawa ke pemerintah pusat.

Selain mengupayakan pembangunan, pemerintah Kalimantan Barat juga membuat kesepakatan kerjasama di bidang Sosial Ekonomi daerah perbatasan Malaysia dan Indonesia (Sosek Malindo). Hal ini sebagai upaya pemerintah guna mempercepat pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan untuk mensejahterakan kehidupan warga negara Indonesia yang tinggal diperbatasan darat Indonesia–Malaysia yang memiliki masalah disparitas sosial.

---

<sup>6</sup> Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 19 April 2018

Program Sosek Malindo pada awalnya dipelopori oleh Dato Musa Hitam<sup>7</sup> dalam sidang *General Border Committee* (GBC) ke-12 pada tanggal 14 Nopember tahun 1983. Demi keefektifan dan lebih efisiennya penyelenggaraan, maka dikuasakanlah kewenangan program KK Sosek Malindo kepada pemerintah daerah yang berbatasan langsung. Yakni Kalimantan Barat-Sarawak, Kalimantan Utara-Sabah, Riau-Malaka-Johor Bahru. Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia–Malaysia (KK Sosek Malindo) tingkat daerah di Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.<sup>8</sup>

Setelah dibentuk kerjasama Sosek Malindo, ditumbuhkan forum Jawatan Kuasa Sosek Malindo tingkat Negeri Sarawak dan Kelompok Kerja Sosek Malindo daerah Kalimantan Barat. Forum kerjasama sosial ekonomi (Sosek) tingkat daerah ini bertugas menyepakati beberapa proyek penting kerjasama pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kawasan perbatasan, menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan perbedaan politik dan sosial, serta menyingkronkan perbedaan peraturan dan perundangan antara kedua negara. Isu lain mengenai *illegal logings*, pemberatasan penyelundupan, serta perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Sedangkan isu penentuan patok batas

---

<sup>7</sup> Tun Dato' Musa bin Hitam pada saat itu menjabat sebagai ketua *General Border Committee* (GBC) dan merupakan wakil Perdana Menteri Malaysia. Sebelumnya, Dato Musa Hitam memegang sejumlah kedudukan penting pemerintahan, termasuk Ketua Otoritas Pengembangan Tanah Federal ([FELDA](#)), Wakil Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Perindustrian Dasar (1974-1978) dan Menteri Pendidikan (1978-1981).

<sup>8</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan (Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, 2003).

ditangani langsung oleh sebuah tim pemerintah pusat di Jakarta dan Kuala Lumpur.<sup>9</sup>

Kewenangan instansi yang menangani program Kelompok Kerja Sosek Indonesia terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pusat dan daerah.<sup>10</sup> Setelah dibentuk kerjasama Sosek Malindo, ditumbuhkan forum Jawatan Kuasa Sosek Malindo tingkat Negeri Sarawak dan Kelompok Kerja Sosek Malindo daerah Kalimantan Barat. Forum kerjasama sosek tingkat daerah ini bertugas menyepakati beberapa proyek penting kerjasama pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kawasan perbatasan, menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan perbedaan politik dan sosial, serta menyingkronkan perbedaan peraturan dan perundangan antara kedua negara. Isu lain mengenai *illegal logings*, pemberatasan penyelundupan, serta perdagangan perempuan dan anak (*traficking*). Sedangkan isu penentuan patok batas ditangani langsung oleh sebuah Tim pemerintah pusat di Jakarta dan Kuala Lumpur.<sup>11</sup>

KK Sosek Malindo tingkat pusat berkedudukan di Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia (Ster TNI) yang diketuai oleh Asisten Teritorial Panglima TNI (Aster Panglima TNI) yang bersekretariat di Markas Besar TNI (Mabes TNI). Sedangkan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat dan diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat.<sup>12</sup> Berdasarkan struktur tersebut, Kelompok Kerja Sosek Malindo merupakan staf tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada *General Borders Committee* (GBC) melalui *Staff Planning Committee* (SPC). Sedangkan Kelompok Kerja Sosek

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Iva Rachmawati dan Fauzan, Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata kelola Perbatasan Indoneisa-Malaysia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 2, November 2012, hlm. 100-101.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 102-103

Malindo tingkat daerah kedudukannya adalah sebagai pembantu KK Sosek Malindo tingkat pusat dengan tugas pokok mengkaji secara detail kerjasama sosial ekonomi di daerah/negeri dan memantau pelaksanaannya sesuai dengan arahan KK Sosek Malindo tingkat pusat.

Berdasarkan struktur tersebut, Kelompok Kerja Sosek Malindo merupakan staf tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada GBC melalui SPC. Sedangkan Kelompok Kerja Sosek Malindo tingkat daerah kedudukannya adalah sebagai pembantu KK Sosek Malindo tingkat pusat dengan tugas pokok mengkaji secara detail kerjasama sosial ekonomi di daerah/negeri dan memantau pelaksanaannya sesuai dengan arahan KK Sosek Malindo tingkat pusat.

## **1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, fokus peneliti yaitu “Program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indoensia - Malaysia (KK Sosek Malindo) di Kalimantan Barat Ditinjau dari Perspektif Diplomasi Pertahanan Indonesia” maka diperoleh subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Program KK Sosek Malindo merupakan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia sebagai upaya penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan perbatasan Kalimantan Barat.
2. Menganalisa dampak dari program KK Sosek Malindo sebagai upaya penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap meningkatkan CBMs dan kesejahteraan bagi Indonesia khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami permasalahan kehidupan yang cukup kompleks. Jarak tempat tinggal mereka yang jauh dan terisolir dari ibukota Provinsi maupun ibukota kabupaten mereka sendiri membuat mereka lebih banyak menggantungkan hidup dari negara tetangga yang jaraknya jauh lebih

dekat. Selain karena memang memiliki beberapa kesamaan seperti bahasa, budaya, suku dan ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan masyarakat negara tetangga. Akan tetapi, adanya kesamaan tersebut tidak pula menjamin tingkat kesejahteraan dan strata ekonomi antara warga negara Indonesia dan penduduk Malaysia yang tinggal berdampingan diperbatasan negara masing-masing. Akibat dari itu semua, batas wilayah negara bukan menjadi tembok penghalang bagi mereka untuk keluar masuk Malaysia demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, bahkan dari sebelum adanya penentuan batas wilayah negara Indonesia–Malaysia masyarakat perbatasan yang serumpun sudah saling berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan.

Pertanyaan penting dalam konteks masalah yang ada pada program KK Sosek Malindo sebagai pelaksanaan dari strategi diplomasi pertahanan yang perlu dikembangkan adalah:

1. Bagaimanakah implementasi program KK Sosek Malindo sebagai upaya penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan perbatasan Kalimantan Barat?
2. Bagaimanakah dampak dari program KK Sosek Malindo yang merupakan upaya penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap meningkatkan CBMs dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang tinggal diperbatasan Kalimantan Barat?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Keberhasilan Program Kelompok Kerja Sosek Malindo sebagai bentuk upaya diplomasi Indonesia terhadap negara tetangga sangat dipengaruhi dari berbagai macam kebijakan dan dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah guna mewujudkan kepentingan nasional Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi Pemerintah yang melaksanakan program KK Sosek Malindo di daerah otonominya tentu mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi

berikut dengan strategi-strategi apa saja yang harus dirumuskan guna mencapai keberhasilan dari kerjasama bilateral antar negara ini. Pelaksanaan KK Sosek Malindo yang telah lama berlangsung tentunya memiliki berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, kondisi masyarakat perbatasan khususnya warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia juga menjadi faktor penting dalam menjalankan program KK Sosek Malindo tersebut.

Melalui program KK Sosek Malindo, hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam kerjasama membangun wilayah perbatasan darat kedua negara menjadi salah satu diplomasi yang mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan antar kedua negara serumpun ini. Pelaksanaan program KK Sosek Malindo juga dapat menjadi peredam dari berbagai perselisihan yang sering terjadi antara Indonesia dan Malaysia.

Oleh karena itu, adapun tujuan penulisan penelitian ini secara umum dan khusus adalah:

1. Untuk mengalisa implementasi program KK Sosek Malindo mulai dari tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan hingga pelaksanaan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia sebagai upaya penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia mengenai perbatasan negara khususnya di wilayah perbatasan negara di Prov. Kalimantan Barat.
2. Untuk mengalisa pengaruh dari program KK Sosek Malindo yang merupakan bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan CBMs dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Karena secara garis besar, diplomasi pertahanan dikategorikan menjadi 3 hal utama yang salah satunya adalah (*Defense Diplomacy for Confidence Building Measures*) diplomasi pertahanan untuk meningkatkan rasa saling percaya. Sedangkan

peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan awal dari pelaksanaan KK Sosek Malindo itu sendiri.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan tambahan sudut pandangan baru terhadap konsep dan kegiatan diplomasi pertahanan, dan juga ilmu pertahanan yang akan terus berkembang dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan untuk menghadapi berbagai ancaman ke depan. Kebutuhan dan cara negara berinteraksi dalam hubungan internasional baik secara bilateral maupun multilateral terutama untuk membangun dan menjaga wilayah-wilayah terluarnya yang rentan akan ancaman dan tantangan yang sangat kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan secara akademis dalam pelaksanaan program KK Sosek Malindo yang merupakan bentuk diplomasi pertahanan Indonesia.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, terutama lembaga-lembaga negara sebagai pengambilan keputusan (*decision maker*) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan diplomatik antar negara, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait yang menyoroti berbagai isu-isu perbatasan darat negara Indonesia untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan rencana pembangunan Indonesia lebih baik ke depan.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIK

#### 2.1 Deskripsi Konseptual

##### 2.1.1 Teori Rezim Internasional

Teori ini berpegang pada asumsi adanya *rational choices* pada salah satu faktor alasan adanya institusi internasional. Keputusan suatu negara untuk bergabung dalam suatu institusi internasional juga berdasarkan perhitungan rasional mengenai keuntungan yang akan didapat. Teori ini erat kaitannya dengan perspektif realisme struktural, yang percaya bahwa institusi internasional merupakan institusi yang stabil, terbentuk lewat peran politik individual aktor-aktor di dalamnya.<sup>1</sup> Institusi internasional terdiri dari berbagai macam aktor-aktor, sehingga jika negara-negara maju berperan penting dalam institusi tersebut maka akan tergambarkan dari kebijakan di dalamnya. Aktor dalam hal ini digambarkan memiliki prioritas dan preferensi yang jelas atas berbagai alternatif, yang dipilih dengan rasional. Hal ini membuat aktor diberi istilah “egois”, mendasarkan pilihannya pada berbagai keuntungan pribadi yang mungkin didapat. Pendekatan ini juga menekankan adanya anarki, yaitu pola struktural yang jelas agar terwujud keteraturan dunia.

Institusi dan norma internasional hanya dapat terwujud dengan adanya kemampuan dan keinginan dari masing-masing negara anggota. Tata anarki percaya akan *self-help*, yaitu “*whether those units live, prosper, or die depends on their own efforts.*” Negara dipercaya tidak dapat mengubah struktur dalam sistem internasional secara signifikan. Aturan-aturan struktural tersebut yang nantinya akan menjadi pedoman bagi aktor untuk membuat

---

<sup>1</sup> T. Gehring, *Dynamic International Regimes: Institutions for International Environmental Governance*, (Swiss: Peter Lang, 1994), hlm. 23-26.

keputusan. Menurut Stephen Krasner, *“international regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area.”* Hal inilah yang membedakan rezim internasional dengan perjanjian lainnya yang bersifat temporer yang dapat berubah sesuai kekuasaan atau kepentingan yang ada di dalamnya. Sementara rezim itu sendiri didefinisikan oleh Krasner sebagai berikut,

*Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision-making procedures around which actors' expectations converge in a given area of international relations. Principles are belief of fact, causation and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of right and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.<sup>2</sup>*

Setiap masyarakat Internasional memerlukan interaksi yang tidak hanya bergerak ke internal negara mereka saja, akan tetapi juga memerlukan adanya saling keterkaitan antara masyarakat negara tetangga. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal dikawasan perbatasan darat suatu negara yang memiliki keterkaitan suku dan ras dan kesamaan lainnya. Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan dan kepentingan. Begitu juga dalam meningkatkan kualitas kehidupan suatu negara dan menjaga kedaulatannya dari berbagai ancaman hingga dapat tetap stabil, pasti akan melakukan interaksi dengan negara lain, salah satunya berupa kerjasama.

Kerjasama antar negara membuktikan adanya suatu interaksi internasional, seperti halnya hubungan diplomatik bilateral anantara Indonesia–Malaysia. Sebagai negara yang bertetangga

---

<sup>2</sup> S. D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables”, *International Organization*, Volume 36, Nomor 02, 1986, hlm. 186.

interaksi antara kedua negara sangat diperlukan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan kedua negara di Kalimantan, terlebih lagi daerah ini terdapat perbatasan darat yang membuat interaksi kedua negara semakin intens dilakukan. Interaksi yang semakin intens antara masyarakat kedua negara secara langsung maupun tidak langsung memicu terjadinya berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga pengelolaan dan pengentasan permasalahan yang ada harus segera dilakukan. Persoalan perbatasan yang semakin kompleks, mendorong kedua negara untuk membentuk sebuah forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral berupa program KK Sosek Malindo yang merupakan salah satu bentuk rezim internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua negara demi membangun dan mensejahterakan wilayah perbatasan negara masing-masing. Pembahasan teori rezim internasional dalam penelitian ini adalah sebagai rujukan untuk membedakan tanggung jawab pelaksanaan kerjasama antar negara yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

### **2.1.2 Perspektif Realisme Struktural**

Dalam studi hubungan internasional, konsep kerjasama internasional mengalami perubahan dan perkembangan didasari pada Sistem Internasional yang selalu dinamis. Dua paradigma utama dalam hubungan internasional yaitu Pluralisme/Liberalisme dan Realisme mempunyai perspektif yang berbeda terutama dalam melihat aktor dominan yang berperan dalam kerjasama internasional. Paradigma realisme yang menganggap negara adalah aktor utama dan terpenting dalam kerjasama internasional, dan menganggap negara adalah aktor yang rasional ternyata belum mampu menjawab tantangan perubahan. Negara, yang memiliki kekuasaan dan kekuatan tentunya akan berupanya untuk *status*

*quo*, dalam arti ingin terus melanggengkan kekuasaannya, mempertahankan kontrol dan pengaruhnya. Hal tersebut membuat paradigma realisme dianggap terlalu terobsesi oleh negara, kurang imajinasi dan belum mampu menawarkan alternatif-alternatif lain menghadapi perubahan sistem internasional. Kemunculan paradigma Pluralis/Liberalis dengan pemikiran bahwa negara yang terdiri atas individu individu dengan beragam kepentingan, belum tentu dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang rasional. Sehingga paradigma pluralis menawarkan alternatif perubahan dengan menganggap pentingnya keterlibatan aktor selain negara, karena tidak mungkin memahami kerjasama internasional tanpa mempertimbangkan beragamnya aktor internasional dan kompleksitas isu dewasa ini. Paradigma Pluralis/Liberalis ini sangat sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Terdapat tiga ide utama yang akan dibahas dalam teori ini yaitu mengenai kapabilitas masing-masing unit dalam rezim, preferensi yang egois dan rasional, sistem anarkis, dan *self-help*. Argumen utama dari teori ini adalah bahwa negara sangat memperhatikan *balance of power* dan berkompetisi untuk meraih kekuasaan atau sekurang-kurangnya agar negara tidak kehilangan kekuasaannya. Akibat kompetisi ini negara hanya memiliki sedikit alternatif dalam mempertahankan kekuasaannya, yaitu dengan meningkatkan sumber daya yang dimiliki. Namun kompetisi atas kekuasaan tersebut membuat keadaan semakin berbahaya karena adanya kemungkinan negara saling melawan satu sama lain.<sup>3</sup> Kompetisi ini dilakukan demi keberlangsungan (*survival*) negara tersebut. Sehingga sangatlah penting bagi suatu negara untuk mengembangkan kekuatan yang dimiliki agar dapat melindungi diri sendiri jika terdapat permasalahan dengan negara lain. Bagi realis

---

<sup>3</sup> John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens. *The Globalization of World Politics*, (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 99.

struktural, kekuasaan merupakan cara untuk mendapatkan tujuan akhirnya, yaitu menjaga keberlangsungan negara itu sendiri. Akar teori yang dikembangkan oleh Waltz, yaitu realisme struktural, menganggap bahwa struktur dari sistem internasional merupakan suatu variabel yang stabil, *“that is formed by the co-action of individual actors and intervenes between their actions and political outcomes.”*<sup>4</sup>

Dalam teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Krasner terdapat dua akar teori yang cukup penting, yaitu realisme struktural dan pendekatan isu. Realisme struktural lebih banyak membahas masalah kapabilitas unit-unit yang dimiliki negara agar dapat bekerja sama dengan baik dalam rezim. Sementara pendekatan isu membahas posisi negara yang terus berubah sesuai dengan isu yang dibahas dalam rezim. Negara memiliki posisi yang berbeda dalam setiap isu tergantung pada pengaruh negara yang bersangkutan dalam isu tersebut. Untuk itu pembahasan mengenai struktur program KK Sosek Malindo akan diuraikan melalui pendekatan realisme struktural yang lebih relevan. Selain itu dalam pelaksanaan program KK Sosek Malindo, kedua negara anggota memiliki satu isu yang sama yaitu kesejahteraan di kawasan perbatasan sehingga akan kurang relevan jika menggunakan pendekatan isu.

### 2.1.3 Konsep Ilmu Pertahanan

Dalam perspektif hubungan internasional antar bangsa, Negara dapat dianalogikan sebagai suatu organisasi yang dapat tumbuh berkembang atau justru malah gagal dan mati. Untuk dapat tetap hidup (*survive*), maka negara harus bisa melakukan upaya mempertahankan diri (*defense*) dengan mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan akan eksistensi negara

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, perkembangan dan revolusi ilmu militer dan ilmu perang mendorong tercetusnya ilmu pertahanan<sup>5</sup>. Akan tetapi, ilmu pertahanan memiliki cakupan makna yang lebih luas dan tidak saja hanya membahas mengenai militer dan perang saja, melainkan juga pertahanan dan keamanan negara secara komprehensif.

Sebagai salah satu disiplin keilmuan, ilmu pertahanan mengkaji mengenai seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan negara serta berkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Makmur Supriyatno, mendefinisikan ilmu pertahanan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional<sup>6</sup>. Kebutuhan untuk mempelajari masalah-masalah pertahanan secara filosofis bermula dari keberadaan suatu entitas yang disebut negara (*state*), dan kebutuhan untuk mempertahankan diri (*survive*) dari ancaman-ancaman (*threats*) terhadap negara. Obyek dari ilmu pertahanan adalah perilaku negara (*state behavior*) dalam menghadapi ancaman, jika bentuk ancamannya militer maka akan dihadapi dengan cara militer pula, namun bila bentuk ancamannya bersifat non militer maka akan dihadapi dengan cara yang non militer.

---

<sup>5</sup> Syarifudin Tippe, *Ilmu Pertahanan; Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hlm. 16.

<sup>6</sup> Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 29.

Dimensi ancaman non militer sangat luas dan beragam. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ketimpangan sosial, ketidakmerataan ekonomi, nasionalisme hingga ancaman tindakan kriminal lintas negara di wilayah perbatasan yang seringkali terjadi seperti dalam bentuk perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan kayu, perdagangan manusia, pelintas batas ilegal, terorisme, pencurian ikan serta penetrasi ideologi asing. Permasalahan tersebut perlu ditangani dengan penanganan nirmiliter secara tepat dan benar melalui pembangunan wilayah perbatasan oleh TNI dan *stakeholder* secara sinergis dan terintegrasi sehingga dapat menjaga stabilitas dan kedaulatan Negara.

Dalam pelaksanaan program hingga KK Sosek Malindo di tingkat pusat maupun daerah, selama ini telah beberapa kali mengalami perubahan kewenangan lembaga yang melaksanakannya. Walaupun demikian, hal serupa tidak terjadi pada forum tertingginya yakni GBC yang merupakan induk dari berbagai kegiatan Kelompok Kerja dibawahnya. Dari semenjak terbentuknya GBC dan SFC hingga saat ini masih dibawah Kementerian Pertahanan<sup>7</sup> sebagai Ketua Forum GBC untuk Indonesia. Oleh karena itu, walaupun pembahasan KK Sosek Malindo lebih berfokus mengenai masalah sosial dan

---

<sup>7</sup> Dalam sejarah Indonesia, Kementerian Pertahanan pernah beberapa kali mengalami pergantian nama lembaga. Pada masa awal kemerdekaan (Masa Orde Lama), lembaga ini bernama "Menteri Keamanan Rakyat" dan kemudian pada masa cabinet Sjahrir II berganti nama menjadi "Menteri Pertahanan". Selanjutnya pada Masa Orde Baru, terjadi 2 kali perubahan yakni pada Kabinet Pembangunan I yaitu "Menteri Pertahanan" yang dirangkap oleh Presiden Jenderal TNI H. M. Soeharto kemudian pada Kabinet Pembangunan II yang mana fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah nama "Departemen Pertahanan Keamanan" yang mana Menteri Pertahanan Keamanan pada saat itu sekaligus dijabat oleh Panglima ABRI. Pada Masa Reformasi, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan ABRI menjadi TNI dan POLRI sekaligus melakukan perubahan nama menjadi "Departemen Pertahanan". Dan pada tahun 2010 nama "Departemen Petahanan" berubah menjadi "Kementerian Pertahanan" hingga sampai saat ini.

perekonomian, sejatinya kedua permasalahan tersebut merupakan perpanjangan dari strategi pertahanan Indonesia.

#### 2.1.4 Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain sehingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi menjadi praktek pelaksanaan perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Dalam pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah lokal disebut dengan *paradiplomacy*. Istilah "*paradiplomacy*" pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah "*parallel diplomacy*" menjadi "*paradiplomacy*", yang mengacu pada makna "*the foreign policy of non-central governments*".<sup>8</sup>

Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang

---

<sup>8</sup> David Crieckemans, *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*, (Belgium: University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, 2008), hlm. 34.

semakin tinggi sehingga kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini. Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Menurut Sir Ernest Satow dalam bukunya, "*Guide to Diplomatic Practice*" memberikan karakteristik terkait tata cara diplomasi yang baik. Sir Ernest Satow mengatakan bahwa diplomasi adalah

*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states.*<sup>9</sup>

Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Pelaksanaannya pun kini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga turut melibatkan aktor-aktor non pemerintah.

Dalam kegiatan diplomasi, salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu, negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan

---

<sup>9</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 35.

secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks kerjasama bilateral, penyelenggaraan diplomasi membutuhkan adanya prioritas bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi harus memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan. Ada berbagai ragam diplomasi, yaitu:

1. Diplomasi *Boejuis-Sipil*, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (*win-win solution*)
2. Diplomasi demokratis, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.
3. Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.
4. Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
5. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap

masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.

6. Diplomasi Perjuangan, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.
7. Diplomasi Multilajur (*Multitrack Diplomasi*), merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
8. Diplomasi Publik (*Softpower Diplomacy*), diplomasi ini menekankan gagasan alternatif penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.<sup>10</sup>

Diplomasi juga menjadi salah satu faktor penyebab baik buruknya hubungan suatu negara terhadap negara tetangga, regional, maupun internasional. Adanya pergantian pejabat dan anggota dari program KK Sosek Malindo secara terus menerus karena jabatan birokratis yang berjangka waktu tertentu, diperlukan adanya perhatian khusus karena hal tersebut menyebabkan kurangnya informasi, pengalaman dan pengetahuan dari anggota. Padahal isu-isu yang bergulir dan dibicarakan membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang luas dalam memahami setiap isu secara berkelanjutan (*sustainable*).

Kerjasama Bilateral Sosek Malindo saat ini belum melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah (masyarakat), padahal keterlibatan pihak ketiga ini sesuai dengan konsep *open diplomacy* dan *new*

---

<sup>10</sup> Shoelhi Mohammad, *Diplomasi: Praktek Komunikasi Internasional*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2011), hlm. 7.

*diplomacy* yang memang memberikan ruang yang luas kepada pihak-pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam berdiplomasi. Apalagi dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuka kesempatan besar bagi aktor-aktor selain pemerintah negara (*non state actors*) untuk turut dapat menjalankan berbagai kegiatan diplomatik antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

### 2.1.5 Konsep Diplomasi Pertahanan

Pada dasarnya, konsep diplomasi pertahanan merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan nasionalnya. Negara Inggris merupakan pencetus awal dari perancangan dan pengaplikasian konsep diplomasi pertahanan di Benua Eropa pada tahun 1998 melalui *Strategic Defence Review*. Dalam Kebijakan Politik Kementerian Pertahanan Inggris Raya, diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan dari diplomasi pertahanan seperti pada pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan setiap negara merupakan salah satu metode untuk mengurangi bahkan menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, serta membantu dalam angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik. Secara operasional, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah bijak suatu negara untuk membangun kepercayaan, menjaga keamanan, bantuan terhadap negara-negara dan pengontrolan senjata (*arms control*).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> United Kingdom, *Defense Diplomacy*, (Ministry of Defence Policy Paper No. 1), hlm. 2-3.

Diplomasi pertahanan pada hakikat awalnya merupakan konsep yang ditujukan dalam ruang lingkup politik internasional maupun militer. Diplomasi Pertahanan diintegrasikan sebagai instrumen militer dan praktek diplomatik suatu negara terhadap masalah-masalah pertahanan dan keamanan negara terkait pencegahan konflik, mengelola krisis, dan potensi perselisihan dengan negara lain. Diplomasi pertahanan digunakan negara tidak hanya dalam rangka kerjasama militer, melainkan juga untuk mempengaruhi sistem atau doktrin pertahanan negara lain dilakukan melalui cara *soft power*.

Sementara itu, Gregory Winger mendefinisikan diplomasi pertahanan yaitu "*generally considered the nonviolent use of a state's defense apparatus to advance the strategic aims of a government through cooperation with other countries*". Secara umum (diplomasi pertahanan) akan memanfaatkan sumberdaya pertahanan tanpa menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis pemerintah yang bekerjasama dengan negara lain dalam bidang pertahanan pula.<sup>12</sup> Sedangkan Cottey dan Forster menguraikan konsep diplomasi pertahanan dengan "*peace time cooperative use of armed forces and related infrastructure (primarily defence ministries) as a tool of foreign and security policy*". Kerjasama masa damai oleh angkatan bersenjata dan Kementerian Lembaga terkait sebagai alat untuk merumuskan kebijakan luar negeri dan kebijakan mengenai keamanan negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Gregory Winger, "*The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*." *IWM Junior Visiting Fellows' Conferences*. Vol. 33. Vienna: Institute fo Human Science, 2018, dalam <http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvetgauntlet/>, diakses pada 02/08/18.

<sup>13</sup> Rodon Pedrason, "Asean's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community", *Unpublished Dissertation* (Heidelberg: Heidelberg University, 2015), hlm. 13.

Namun, Cottey dan Foster sepakat bahwa perlu adanya suatu perluasan makna dan pengertian dalam mendefinisikan diplomasi pertahanan di era kontemporer. Pengertian konsep diplomasi pertahanan sebelumnya yang hanya menekankan pada aspek militeristik menurutnya tidak lagi dapat merepresentasikan secara keseluruhan mengenai diplomasi pertahanan. Perluasan tersebut berimplikasi terhadap pergeseran makna mengenai diplomasi pertahanan. Cottey dan Forster melihat bahwa *Military Cooperation and Military Assistance* tetap merupakan komponen fundamental di dalam diplomasi pertahanan. Pada perkembangannya diplomasi pertahanan mengalami pergeseran makna, melalui penjelasan Andrew Cottey dan Anthony Forster dalam bukunya yang berjudul "*Reshaping Defence Diplomacy: The New Roles for Military Cooperation and Assistance*" menyebutkan bahwa:

*Old defence diplomacy, with its realpolitik emphasis on countering enemies, and new defence diplomacy, with its emphasis on engagement with potential enemies, support for democracy, good governance, and human rights, and enabling states to deal with their own security problems.*<sup>14</sup>

Strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan industri. Namun secara parsial bahwa aktivitas diplomasi pertahanan suatu negara memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

1. *Defense diplomacy for Confidence Building Measures (CBMs)*

Tujuan dari pelaksanaan *Confidence Building Measures (CBMs)* adalah untuk membangun hubungan baik dan meningkatkan rasa saling percaya antara satu negara dengan

---

<sup>14</sup> Cottey, Andrew dan Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: The New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 46

negara yang lainnya. Membangun rasa saling percaya ini utamanya dilakukan untuk memperkecil, menghindari dan menghilangkan terjadinya mispersepsi dan kesalahpahaman antar negara atau juga bertujuan untuk menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka dalam kebijakan negara, saling transparansi dalam pengembangan kemampuan agar apa yang sedang dan telah dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lainnya.

## 2. *Defense Diplomacy for Defense Capabilities*

Karakter diplomasi pertahanan yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan adalah pembangunan kapabilitas (*capacity building*). Pengembangan kemampuan atau kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara-negara karena sistem internasional yang bersifat anarki dimana tidak ada kekuasaan atau otoritas aktor yang lebih kuat daripada negara itu sendiri. Adapun diplomasi dalam tatanan ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial. Kegiatan diplomasi pertahanan dalam tatanan *capacity building* ini, antara lain seperti usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer, kredit ekspor, pembelian alutsista, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk membangun kapabilitas pertahanan negara.

## 3. *Defense Diplomacy for Defense Industry*

Kegiatan diplomasi pertahanan mengenai industri pertahanan bertujuan untuk pembangunan dan penguatan industri pertahanan suatu negara. Cara ini dilaksanakan melalui kerjasama strategis antar negara dalam mempromosikan, pengembangan dan penelitian, investasi dan produksi alat peralatan, persenjataan, dan kendaraan militer. Mengingat kerjasama industri pertahanan membutuhkan berbagai macam keahlian dan keterampilan, maka banyak negara- negara yang melakukan kerjasama dalam bidang

pertahanan dengan cara *Transfer of Technology* (ToT) dan *Transfer of Knowledge* (ToK).<sup>15</sup>

Setiap kerjasama antar negara adalah suatu bentuk pelaksanaan diplomasi yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan antar negara anggotanya. Begitu pula pelaksanaan KK Sosek Malindo yang merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan diplomasi di bidang pertahanan khususnya untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya atau CBMs antara Indonesia dan Malaysia.

#### **2.1.6 Teori *Confidence Building Measures* (CBMs)**

Dalam dinamika hubungan internasional yang semakin berkembang, saling ketergantungan atau *interdependence* antar negara juga semakin menguat. Keterkaitan antar masalah yang sama khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dihadapi semakin kompleks. Sebagai akibatnya, batas-batas antar negara semakin kabur sehingga makna dari kaidah-kaidah kedaulatan negara dan integritas teritorial semakin terkikis. Disisi lain, adanya globalisasi memunculkan gejala yang kontradiksi dan ketidakpastian, disatu pihak menuntut setiap negara untuk membuka diri terhadap segala aspek, namun dilain pihak memunculkan gejala meningkatkan proteksi atau pembatasan-pembatasan terhadap dampak yang tidak dapat dihindari.

Kerjasama internasional dalam bidang pertahanan atau diplomasi pertahanan dilaksanakan untuk membangun dan memelihara *Confidence Building Measures* (CBMs). Tindakan membangun kepercayaan secara luas didefinisikan sebagai tindakan yang membahas, mencegah, atau mengatasi peningkatan

---

<sup>15</sup> Idil Syawfi, "Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan - Tujuan Pertahanan Indonesia", *Tesis Magister*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm.28.

permusuhan dan membangun rasa saling percaya antar negara. Bentuk kerjasama CBMs bisa dilakukan secara formal atau informal, unilateral, bilateral, maupun multilateral, militer atau politik, dan dapat dilakukan oleh *state to state* atau non pemerintah. CBMs relevan dalam menangani dan bekerja menuju resolusi kemandekan politik jangka panjang. Tindakan membangun kepercayaan atau CBMs dikembangkan antara aliansi militer selama Perang Dingin untuk menghindari serangan nuklir oleh kecelakaan dan telah melebar ke daerah lain baik dalam aspek militer dan non militer. Pertama kali disusun dari dalam konteks manajemen konflik Eropa di tahun 1970-an, konsep CBMs termasuk militer, budaya, dan pertukaran sosial, dan telah diterapkan untuk konflik di seluruh dunia.<sup>16</sup>

Rasa saling percaya sejatinya harus dipupuk dengan negara-negara lain. Selanjutnya diharapkan kerjasama internasional dalam rangka diplomasi pertahanan dapat menjadi pencegahan konflik melalui diplomasi, dalam lingkup regional negara Asia Tenggara yang ada pada forum ASEAN saling menghormati kedaulatan, sistem kekerabatan, dan tidak mencampuri urusan internal negara tersebut.<sup>17</sup> Rasa saling percaya antar negara membuat kenyamanan dan perdamaian itu lebih mudah tercapai. Adanya kepentingan bersama juga dapat dicapai secara bersama pula dengan melakukan kerjasama antar negara. Seperti yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam kegiatan KK Sosek Malindo yang sama-sama bertujuan untuk membangun kawasan perbatasan antar kedua negara. Kerjasama khususnya

---

<sup>16</sup> Bonnie Glaser S, “*Confidence-Building Measures*. Center for Strategic and International Studies”, Washington DC, 2015) dalam <http://csis.org/programs/international-security-program/asia-division/cross-strait-security-initiative-/confidence> diakses pada 02 September 2018.

<sup>17</sup> Parulian Simamora, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 204.

dalam rangka pengelolaan perbatasan negara memang perlu lebih diperhatikan. Dalam kasus ini pemerintah kedua negara (Indonesia dan Malaysia) harus dapat bekerjasama dengan baik pada sektor-sektor utama yang menjadi prioritas utama pembahasan agar jalannya pengelolaan perbatasan di kedua negara menjadi tidak bias. Strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan rasa saling percaya melalui program KK Sosek Malindo tidak hanya menjadi harapan baiknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia (*Government to Government*), akan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan antara masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia (*people to people contact*).

#### **2.1.7 Konsep Perbatasan**

Secara umum, perbatasan dipahami sebagai garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu sebelumnya tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kemasyarakatanegaraan yang berbeda. Dalam perspektif geografi politik, pengertian perbatasan dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang membatasi atau mengikat (*bound or limit*) suatu negara sebagai unit spasial politik yang berdaulat. Sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya, terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari letak negara tersebut. walaupun memiliki berbeda pengertian, kedua

makna tersebut memiliki nilai yang strategis dan saling melengkapi kepentingan nasional kedaulatan wilayah Negara.<sup>18</sup>

Batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang dipisah. Klasifikasi secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu:

1. *Antesedent boundaries*

Perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya. Jadi terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

2. *Subsequent boundaries*

Perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antar dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama.

3. *Superimposed boundaries*

Perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *subsequent boundaries* namun tidak berkaitan dengan pembagian secara sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan.

---

<sup>18</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 36-37.

#### 4. *Relic boundaries*

Perbatasan yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama di bentang budayanya. Tipe ini biasanya terjadi pada suatu negara yang secara sukarela maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalam wilayah negara lain.

Sedangkan klasifikasi morfologis adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan proses terbentuknya. Berdasarkan morfologinya perbatasan dibedakan menjadi dua tipe, yakni:

##### 1. *Artificial boundaries*

Perbatasan yang batasnya merupakan buatan manusia.

##### 2. *Natural boundaries*

Perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah.<sup>19</sup>

Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah antar dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antar keduanya. Perbatasan negara pada hakekatnya dapat merupakan wilayah darat dan wilayah perairan. Perbatasan di wilayah darat dapat berupa perbatasan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi alami (seperti; gunung, laut atau sungai) dan yang ditentukan dengan kondisi-kondisi buatan (seperti; patok, pagar, atau garis imajiner).<sup>20</sup> Oscar J. Martinez menjelaskan ada empat tipe perbatasan, yaitu:

##### 1. *Alienated borderland*

Suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 42-43.

<sup>20</sup> Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm. 7.

2. *Coexistent borderland*

Suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bias ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.

3. *Interdependent borderland*

Suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relative stabil. Penduduk di kedua bagian perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang aslinya menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

4. *Integrated borderland*

Suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.<sup>21</sup>

Sebelum diperkenalkan konsep negara modern berdasarkan perjanjian Westphalia pada tahun 1648, wilayah Indonesia dan Malaysia tidak mengenal batas fisik teritorial maupun batas kultural. Namun, pasca dekolonisasi menjadi negara modern yaitu semenjak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Malaysia sejak tanggal 31 Agustus 1957, maka mulai dikenal garis demarkasi (perbatasan) antar dua

---

<sup>21</sup> Suyatno, *Globalisasi, Perbatasan Indonesia, Malaysia dan Local Governance, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 63.

negara bertetangga tersebut.<sup>22</sup> Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan Presidential yang mana Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, kepala negara Malaysia adalah Yang di Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia ini mirip dengan sistem parlementer *Westminster*.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, negara modern harus mampu dan mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah dan mempertahankan kedaulatannya. Upaya menjaga keutuhan dan wilayah dan mempertahankan kedaulatan tidak lagi hanya bergantung kepada penjagaan personel militer yang diugaskan digaris-garis perbatasan negara, akan tetapi dapat dilakukan dengan berdasarkan paradigma kesejahteraan melalui pembangunan dan kerjasama bilateral antar negara yang saling berbatasan. Pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan desa.

Melalui Program Nawacita,<sup>23</sup> pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan percepatan pembangunan khususnya di wilayah-

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 139.

<sup>23</sup> Nawacita adalah istilah umum yang diambil dari bahasa sansekerta *nawa* artinya sembilan dan *cita* artinya harapan, keinginan, dan impian. Nawacita yaitu sembilan harapan, keinginan, impian dari Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang digunakan istilah dalam keperluan politik saat beliau mencalonkan diri sebagai Presiden bersama Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2014. Nawacita

wilayah terluar Indonesia. Hal itu juga turut dirasakan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Pembangunan infrastruktur, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), akses jalan, dan pembangunan lainnya semakin mempermudah masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya secara mandiri dan tidak bergantung lagi dengan Negara Malaysia.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Dari penelitian terdahulu yang digunakan, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Peneliti mengambil manfaat dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dan referensi dalam memperkaya teori dan bahan kajian sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang berkelanjutan dalam penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian yang berupa jurnal, tesis, dan disertasi. Berikut penjelasan singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan perbandingan mengenai persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini:

1. Penelitian oleh Nurfitri Nugrahaningsih pada tahun 2015 dengan judul “Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia; Studi tentang Sosek Malindo dalam pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Jagoi Babang Kab. Bangkayang Kalimantan Barat”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang efektivitas

---

digunakan sebagai salah satu visi-misi dalam membangun Indonesia yang berisi sembilan pokok agenda prioritas untuk melanjutkan semangat perjuangan dari Presiden Ir. Soekarno yang dikenal sebagai Trisakti yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

dan rencana pemerintah daerah Prov. Kalimantan Barat dan pejabat Negeri Sarawak Malaysia untuk menjadikan PPLB Jagi Babang sebagai pembahasan dalam pertemuan KK Sosek Malindo tingkat daerah. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan lokus penelitian yang hanya di PPLB Jagoi Babang di Kab. Bengkayang Kalimantan Barat.

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 pula oleh Jawahir Thontowi dengan judul “Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia.” Dalam penelitian ini, dibahas mengenai beberapa peraturan internasional dan nasional yang mengatur tentang wilayah perbatasan dan beberapa kegiatan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia khususnya di daerah Kalimantan Barat. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang hanya berlokus di Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat. Yang mana PLBN Entikong merupakan PLBN tertua dan menjadi perlintasan yang paling aktif digunakan untuk melintasi kedua Negara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqamah dengan judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Upaya Untuk Memasukkan Segmen Tanjung Datu Sebagai *Outstanding Boundary Problem* Indonesia–Malaysia” pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data indeep interview. Dalam penelitian ini membahas tentang instrument diplomasi pertahanan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan wilayah Tanjung Datu dalam perundingan agenda upaya untuk menjadikan Tanjung Datu sebagai (*Outstanding Boundary Problem*) OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002.

4. Penelitian terakhir yang relevan adalah penelitian disertasi Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, S.IP. dengan judul “Kebijakan dan scenario planning pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia; Studi kasus perbatasan darat di Kalimantan” pada tahun 2014. Dalam penelitian banyak membahas secara luas mengenai berbagai macam permasalahan yang ada di perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia. Dalam penelitian ini juga menganalisa berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola perbatasan negara khususnya di Kalimantan Barat.

Peneelitan ini memiliki beberapa relevansi kesamaan dengan beberapa penelitian-peneitian yang sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan fokus dan subfokus pembahasan tersendiri. Dalam penelitian ini, peneliti juga membahas kajian KK Sosek Malindo berdasarkan perspektif diplomasi pertahanan. Yang mana kajian serupa belum pernah dilakukan dengan lokus dan fokus yang sama. Adapun penelitian, lebih fokus terhadap analisa implementasi KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak dan analisa terhadap dampak dari implementasi KK Sosek Malindo berdasarkan perspektif diplomasi pertahanan untuk meningkatkan CBMs, serta pengaruh implementasi KK Sosek Malindo di Kalimantan Barat terhadap kesejahteraan Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| Nama                     | Tahun  | Judul Penelitian  | Metode Penelitian  | Hasil Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  |
|--------------------------|--|---|--|---|--|--|
| Nurfitri Nugrahainingsih | Sosiohumaniora, Volume 17 No. 2 Juli 2015: 149-155 | Kerjasama Bilateral Indonesia–Malaysia:<br><br>Studi Tentang Sosek Malindo Dalam Pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat | Metode Kualitatif deskriptif<br><br>Dengan pendekatan Case Studi | PPLB di Jagoi Babang belum merupakan mutual priority antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Indonesia menganggap PPLB Jagoi Babang sebagai prioritas dilihat dari tingginya mobilitas warga Indonesia yang menggunakan PLB dan pembangunan yang sudah dilakukan. Malaysia belum menjadikan PPLB Jagoi Babang sebagai prioritas karena belum menguntungkan secara sosial ekonomi. Keberadaan pasar Serikin yang saat ini lebih menguntungkan Malaysia secara ekonomis membuat pemerintah Malaysia lebih memprioritaskan border Aruk di Kab. Sambas yang berbatasan dengan Biawak (Malaysia). Selain itu, masyarakat perbatasan di wilayah Jagoi Babang juga belum menganggap PPLB sebagai prioritas. | Membahas tentang Program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia–Malaysia (KK Sosek Malindo) di Kalimantan Barat<br><br>Penelitian menggunakan metode kualitatif | Perbedaan lokus penelitian:<br><br>Penelitian sebelumnya di PLB Jagoi Babang Kab. Bengkayang<br><br>Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah daerah Prov. Kalbar |

|                  |  |   |   |  |   |  |
|------------------|--|---|---|--|---|--|
| Jawahir Thontowi | Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015                        | Hukum Dan Diploması Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia |   | <p>Beberapa peraturan internasional dan nasional yang mengatur tentang wilayah perbatasan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks di wilayah perbatasan.</p> <p>Pemerintah daerah telah terlibat dalam banyak diplomasi lokal melalui mediasi yang dilakukan oleh adat setempat, baik dalam kasus privat maupun publik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah tersebut, penyediaan pembangunan kapasitas yang memungkinkan pemerintah daerah dan aparatur adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan lebih baik.</p> | <p>Membahas hubungan diplomatik antara Indonesia–Malaysia di perbatasan darat pulau Kalimantan</p> <p>Adanya pembahasan tentang penyelesaian berbagai konflik sengketa perbatasan antara Indonesia – Malaysia</p> <p>Sama menggunakan metode kualitatif</p> | <p>Hanya membahas hubungan diplomatik antara Indonesia–Malaysia di perbatasan Entikong Kab. Sanggau (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia)</p> <p>Membahas kerjasama bilateral dalam perspektif diplomasi pertahanan dalam program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK Sosek Malindo)</p> |
| Istiqamah        | Jurnal Pertahanan & Bela Negara: Desember 2017, Volume 7 Nomor 3 | Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Upaya Untuk Memasukkan Segmen Tanjung Datu Sebagai                 | <p>Metode Kualitatif deskriptif</p> <p>Dengan pendekatan Case Studi</p> | Bentuk instrumen diplomasi pertahanan yang dapat dilihat dalam perundingan agenda upaya untuk menjadikan Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada tahun 2001 dan 2002 adalah forum diskusi, kehadiran Atase Pertahanan dalam perundingan   | Membahas tentang penyelenggaraan diplomasi pertahanan serta analisisnya dalam upaya menyelesaikan sengketa klaim disalah satu   | Studi kasus dan lokus penelitian berbeda tempat namun tetap dalam satu Provinsi yang sama  |

|          |   |  |  |   |  |   |
|----------|---|--|--|---|--|---|
|          |   | <i>Outstanding Boundary Problem</i><br>Indonesia–Malaysia  |  | serta institusi militer lain sebagai representatif aktor utama diplomasi pertahanan, adanya penulisan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perundingan agenda upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP IndonesiaMalaysia pada tahun 2001 dan 2002 serta interaksi militer-sipil yang sinergis dengan tujuan utama mencapai kepentingan nasional negara Indonesia.                                     | wilayah perbatasan Kalimantan Barat<br><br>Metode yang digunakan juga kualitatif<br>Penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang sama pula, yakni: <i>indeeph interview</i> .   |   |
| Moeldoko | Disertasi Doktoral, FISIP Universitas Indonesia, 2014 | Kebijakan dan <i>senario planning</i> pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia (studi kasus perbatasan darat di Kalimantan) | Metode Kualitatif deskriptif<br><br>Dengan pendekatan Fenomenology | Dari analisis kebijakan disimpulkan adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan, yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Dari analisis implementasi kebijakan disimpulkan adanya ketidakefektivan implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan prasarana dan sarana. Dari <i>senario planning</i> disimpulkan adanya empat <i>driving forces</i> yaitu politik, | Membahas secara luas segala macam permasalahan yang terdapat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia)<br><br>Hasil penelitian dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan | Lebih mendalam membahas hubungan bilateral kerjasama Indonesia–Malaysia dalam perspektif Diplomasi Pertahanan |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>pembangunan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan, dan bahwa apabila tidak dilakukan perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk pada Skenario Merah Putih Setengah Tiang atau Merah Putih Turun Tiang. Untuk itu, perubahan atau penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan dibutuhkan. Berkenan dengan isi kebijakan direkomendasikan perlunya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, serta perlunya pengembangan Grand Design Penataan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan.</p> <p>Penelitian kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan perlu dikembangkan lebih lanjut, dan, kedua, sintesa teoritik dalam penelitian kebijakan yang mendasarkan pada teori-teori struktur kebijakan dan kontekstualisasi kebijakan serta dipadukan dengan teori-teori evaluasi kebijakan serta teori-teori reformasi teritorial perlu</p> | <p>keputusan untuk membangun perbatasan. Khususnya perbatasan darat Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia)</p> |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>dikembangkan lebih lanjut.</p> <p>Penelitian ini memiliki tiga implikasi, yakni:</p> <p>Pertama, perlunya perbaikan atau penyempurnaan kebijakan dengan mendasarkan pada analisis kebijakan terkait demi terwujudnya skenario ideal.</p> <p>Kedua, perlunya kajian kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan demi merumuskan peraturan perundangundangan yang bersifat <i>lex specialis</i>.</p> <p>Ketiga, perlunya intervensi pemerintah dalam hal pemekaran daerah, membuat tata wilayah pengembangan baru dalam bentuk daerah administratif di perbatasan.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data mengenai bentuk-bentuk kegiatan program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia–Malaysia (KK Sosek Malindo), beberapa tujuan tempat penelitian yang dikunjungi sehingga dapat menunjang analisis penelitian ini antara lain:

1. Kementerian Pertahanan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat.
3. Biro Pemerintahanan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

##### 1.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2018 hingga bulan Desember 2018 dengan rincian waktu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

| No. | KEGIATAN                                   | BULAN   |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|--|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
|     |  | Agustus |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   | November |   |   |   | Desember |   |   |   | Januari |   |   |   | Februari |   |   |   |
|     |  | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1   | Penulisan Draft Proposal Tesis             | ■       | ■ |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 2   | Konsultasi dan Bimbingan                   |         |   | ■ | ■ |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 3   | Sidang Ujian Pra Proposal                  |         |   |   |   | ■         | ■ |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 5   | Perbaikan Draft Proposal                   |         |   |   |   |           |   | ■ | ■ |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 6   | Sidang Ujian Proposal Tesis                |         |   |   |   |           |   |   |   | ■       | ■ |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 7   | Revisi Proposal Tesis                      |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   | ■ | ■ |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 8   | Pengumpulan dan Pengolahan Data            |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 9   | Konsultasi, Bimbingan dan Penyusunan Tesis |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 10  | Sidang Pra Tesis                           |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   | ■        | ■ |   |   |
| 11  | Sidang Tesis                               |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 12  | Perbaikan Tesis                            |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   | ■ | ■ |

#### 3.2 Subyek dan Obyek Penelitian

#### 3.3

### **3.3.1 Subyek Penelitian**

Subyek dari penelitian ini adalah para informan yang menjadi sumber data primer. Pemilihan informan merupakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, dan dan pelaksana kegiatan program KK Sosek Malindo yakni Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### **3.3.2 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini didasarkan pada kriteria-kriteria sesuai dengan metode *purposive sampling* dimana strategi pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan mengarah pada tujuan penelitian. Pertimbangan tersebut dapat dikategorikan dengan seberapa relevan serta berpengalaman dalam topik penelitian yang akan dibahas. Sehingga obyek penelitian ini adalah individu yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan diplomatik Indonesia–Malaysia yang merupakan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam program Kelompok Kerja Indonesia–Malaysia (KK Sosek Malindo) tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui wawancara (*in depth interview*) dan studi literatur (*desk research*). Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam upaya diplomasi dan pelaku-pelaku yang mendukung program Kelompok Kerja Sosek Malindo. Wawancara yang intensif dengan informan untuk mengeksplorasi perspektif mereka tentang ide, program, atau situasi tertentu. Terkait dengan penelitian atau tentang

pengalaman dan harapan mereka yang terkait dengan penelitian, pemikiran mereka tentang operasi penelitian, proses, dan hasil, dan tentang setiap perubahan yang mereka rasakan dalam diri mereka sebagai hasilnya keterlibatan mereka dalam program ini.<sup>1</sup> Proses tanya jawab dilakukan langsung secara bertatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Sedangkan untuk data sekunder pada penelitian ini akan menggunakan teknik studi literatur (*desk research*) yang berasal dari buku, dokumen kegiatan, penelitian, jurnal, dan informasi lain yang didapatkan melalui media elektronik maupun cetak.

### **3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah manusia sebagai informan dan *key informan*. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemeriksaan atas keabsahan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu proses untuk menjangkau data yang diperoleh dengan dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama, maka teknik triangulasi sangat bermakna untuk mendapatkan data yang lebih kredibel.

Teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber, memiliki arti untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi dilakukan dengan 4 cara:

---

<sup>1</sup> Boyce C. and Neale P., *Conducting Indepth Interview*, (United States of America: Pathfinder Internasional, 2006), hlm. 59.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil suatu wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkait.<sup>2</sup>

Robert K. Yin menjelaskan bahwa triangulasi data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan multi sumber data. Dalam proses ini peneliti melakukannya dengan membandingkan adanya kesamaan informasi data-data yang didapat dari satu informan ke informan lain.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan merupakan metode studi kasus yang disampaikan oleh Robert K. Yin sebagai suatu penjelasan yang komprehensif dan berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu organisasi, suatu kelompok, suatu program ataupun suatu situasi masyarakat yang diteliti. Validitas dan obyektifitas merupakan persoalan fundamental dalam kegiatan ilmiah. Agar data yang diperoleh peneliti memiliki validitas dan obyektifitas yang tinggi, diperlukan beberapa persyaratan yang diperlukan. Berikut ini akan peneliti kemukakan metode yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan obyektifitas suatu penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif.<sup>3</sup>

Salah satu hal penting dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan adalah dengan melakukan coding. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, yaitu:

---

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 178.

<sup>3</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 46.

*data condensation, data display* dan *conclusion drawing/verification*. Dalam mengkondensasi data, peneliti akan memilih data yang didapat dari wawancara maupun observasi, untuk selanjutnya dianalisis, dan beralih ke *data display* dimana seluruh data yang telah dikondensasikan akan ditampilkan secara bersamaan. Dalam teknik analisis ini akan dipilih data mana saja yang akan selanjutnya dibuatkan kesimpulannya dalam proses *drawing and verifying conclusions*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook, 3<sup>rd</sup> Edition* (SAGE Publication, 2014), hlm. 33.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian**

Terdapat tiga provinsi dipulau Kalimantan wilayah negara Indonesia yang memiliki perbatasan secara langsung dengan negara tetangga Malaysia. Ketiga provinsi tersebut antara lain Kalimantan Barat–Sarawak, Kalimantan Timur–Sabah dan Kalimantan Utara–Sabah. Dengan panjang perbatasan yang lebih dari 2000 km, diperlukan sarana dan prasana demi menunjang masalah-masalah di wilayah perbatasan. Provinsi Kalimantan Barat – Sarawak merupakan daerah perbatasan yang memiliki garis batas terpanjang dan merupakan wilayah perbatasan yang paling aktif digunakan dalam melakukan berbagai kegiatan pelintasan bagi kedua negara bertetangga ini.

Sebelum era reformasi, administrasi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, serta satu kota, yaitu Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi. Pasca reformasi yang menghasilkan adanya otonomi daerah, wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Barat telah mengalami beberapa kali pemekaran daerah yang kini terdiri atas Kabupaten/Kota yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan jumlah kelurahan dan kecamatan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat saat ini adalah sebanyak 55 kelurahan, 174 Kecamatan dan 2.031 desa.<sup>1</sup> Adapun Kabupaten yang memiliki batas wilayah secara

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2018, hlm. 3.

langsung dengan Malaysia antara lain; Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, dan Kab. Kapuas Hulu.

Perjanjian kerjasama perbatasan yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dimulai dengan dalam kerjasama dibidang keamanan sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai pengaturan dalam bidang keamanan daerah-daerah perbatasan ini direvisi untuk pertama kali pada tahun 1972, dan kemudian revisi kedua pada tahun 1984. Dalam revisi yang kedua tersebut kerjasama perbatasan Indonesia–Malaysia diperluas hingga mencakup berbagai jenis bidang kerjasama yaitu, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Menindak lanjuti kesepakatan tersebut, Ketua Bersama GBC Indonesia – Malaysia (Malindo), telah membentuk satu kelompok kerja baru di lingkungan GBC Malindo yaitu Kelompok Kerja Bidang Sosial – Ekonomi.

Pada sidang ke XII GBC Malindo, SPC Malindo, sebagai koordinator perencanaan kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha tercapainya kerjasama pembangunan sosial ekonomi tersebut. Selanjutnya, pada sidang ke XVII SPC yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 18 September 1984, Kelompok Kerja telah menyampaikan laporannya tentang perlunya untuk membentuk Komite Khusus yang bertanggung jawab dalam bidang kerjasama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari hasil pembahasan kertas kerja yang di sampaikan, maka sidang ke XVII SPC Malindo, menerima dan menyetujui saran yang di sampaikan oleh kelompok Kerja untuk selanjutnya akan dilimpahkan dalam sidang ke XIII GBC Malindo guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Berdasarkan Laporan Ketua Bersama SPC Malindo, maka Ketua Bersama GBC Malindo dalam sidangnya ke XIII yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 3 Desember 1984 telah memutuskan dan menginstruksikan antara lain agar SPC membentuk Komite/Jawatan Kuasa Bersama yang bertugas untuk merencanakan dan

mengkoordinasikan pembangunan sosial ekonomi antara Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia demi keamanan berkaitan dengan keselamatan daerah perbatasan kedua negara. Demi mempercepat pembangunan dikawasan perbatasan negara di Kalimantan Barat – Sarawak, pemerintah Indonesia dan Malaysia sejak 1985 menyepakati kerjasama percepatan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara dengan menumbuhkan forum kerjasama pembangunan Sosial dan Ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan keputusan Ketua Bersama GBC Malindo tersebut, maka Panglima ABRI saat itu (sekarang TNI), selaku Ketua GBC Indonesia membentuk Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK) Sosek Malindo yang pertemuannya masih terus berlangsung hingga saat ini.

Perjanjian kerjasama KK Sosek Malindo merupakan perjanjian internasional yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk *Term of Reference* (TOR). TOR tersebut menjadi acuan bagi kedua Negara dalam melakukan perundingan-perundingan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pembangunan sosio-ekonomi tersebut adalah pendekatan prosperity dan security dengan sasaran yakni untuk merangsang kegiatan produksi masyarakat khususnya daerah perbatasan dan mendorong dan meningkatkan mutu lingkungan serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintah.<sup>2</sup>

#### **4.1.1 Hasil Penelitian Implementasi Program KK Sosek Malindo**

Peraturan yang mengatur Peraturan mengenai KK Sosek Malindo didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 yang terdiri dari beberapa tahap:

Pertama, tahap penjajakan. Tahap penjajakan adalah tahap dimana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian

---

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, *Term Of Reference* (TOR) Tahun 2010, Pembangunan Sarana dan Landasan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, hlm. 3.

internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga pemerintahan (negara) di Indonesia atau inisiatif dari pihak luar. Dalam perjanjian kerjasama Sosek Malindo gagasan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama bidang sosial dan ekonomi di daerah perbatasan Indonesia–Malaysia khususnya daerah Kalimantan, pertama kali dicetuskan oleh Dato' Musa Hitam yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia selaku Ketua GBC Malaysia pada sidang ke XII GBC. Selanjutnya gagasan tersebut ditanggapi secara positif oleh Jenderal TNI L.B. Moerdani selaku Panglima ABRI, sebagai Ketua GBC Indonesia.

Kedua, tahap perundingan. Tahap perundingan adalah suatu upaya yang ditempuh oleh para pihak yang membuat perjanjian internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui pada tahap penjajakan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Sosek Malindo, hasil tindak lanjut dari gagasan untuk membentuk perjanjian kerjasama sosial ekonomi tersebut, maka SPC Malindo, sebagai koordinator perencanaan kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha tercapainya kerjasama pembangunan sosial dan ekonomi tersebut. Pada perundingan yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 28 September 1984, dimana dari hasil pembahasan kertas kerja yang disampaikan, maka sidang atau perundingan SPC Malindo, menerima dan menyetujui saran yang disampaikan oleh kelompok kerja untuk selanjutnya akan disampaikan dalam perundingan GBC Malindo guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Setelah adanya persetujuan dan pengesahan dalam sidang GBC tersebut, maka berdasarkan keputusan GBC Malindo tersebut, maka panglima ABRI selaku Ketua GBC Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja (KK) Sosek Malindo tingkat pusat dan KK Sosek Malindo di tingkat daerah.

Kelompok Kerja Sosek Indonesia tingkat daerah di Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum internasional, beban pertanggungjawaban perjanjian internasional tetap berada di pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi KK Sosek Malindo yang terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pusat dan daerah. KK Sosek Malindo tingkat pusat saat ini berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri dari yang sebelumnya dikuasakan kepada Kementerian Pertahanan dan Asisten Teritorial Panglima TNI pada masa awal terbentuknya KK Sosek Malindo.<sup>4</sup> Sedangkan KK Sosek Malindo Tingkat Daerah Kalimantan Barat saat ini menjadi dipertanggungjawabkan pada Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat setelah mengalami beberapa pemindahan kewenangan mulai dari Badan Pembangunan Perbatasan Desa Tertinggal (BP2DT) hingga dibubarkannya instansi tersebut, yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Drs. Dudi Nugraha (Kasubbag. Pengelolaan Perbatasan, Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat) di Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Barat Pada tanggal 06 November 2018

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayjen. TNI (Purn) Dr. Syaiful Anwar, M.Bus. (Direktur Kerjasama Internasional Ditjen. Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan 2008-2011), dan dan Kol. CZI Sugeng Haryadi Yogopranowo (Kepala Subdit Kerjasama Bilateral Dit. Kerjasama Internasional, Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan) yang sama-sama menerangkan bahwa kewenangan Instansi pemerintah pusat dalam menangani kegiatan KK Sosek Malindo telah mengalami beberapa pergantian *Stake Holder*. *Pertama*, dibawah komando Asisten Teritorial Panglima TNI. *Kedua*, dibawah struktur GBC Dir. Kerjasama Internasional Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. *Ketiga*, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri.

kemudian beralih ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, hingga kemudian kewenangan tersebut baru ditugaskan kepada Biro Pemerintahan semenjak tahun 2016 silam.<sup>5</sup>

Perubahan-perubahan lembaga dan instansi yang berwenang dalam menangani program ini baik dari tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah menjadi salah satu kendala teknis dalam pelaksanaan KK Sosek Malindo bagi Indonesia. Selain pergantian kewenangan lembaga dan instansi yang melaksanakan, individu yang menjadi pejabat berwenang juga kerap kali mengalami pergantian sehingga diperlukan adanya penyesuaian baru dalam setiap pergantian. Berbanding terbalik dengan struktur pemerintahan Malaysia yang jarang sekali mengalami perubahan struktural dan bahkan hingga individu yang menangani program KK Sosek Malindo tersebut. Perbedaan struktur organisasi yang berwenang antara pemerintah Indonesia dan Malaysia cukup menyulitkan pemerintah Indonesia sendiri dalam menyusun *counterpart-counterpart* untuk menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Malaysia. Mengutip hasil wawancara kami dengan Drs. Dudi Nugraha selaku Kasubbag Pengelolaan Perbatasan, Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat:

Struktur organisasi yang berbeda antara pemerintah Indonesia dan Malaysia cukup menyulitkan kami untuk menyusun counterpart-counterpart dalam menjalin hubungan kerjasama. selain itu, di pemerintahan Indonesia sendiri sering terjadi perubahan kewenangan dalam menangani pembahasan isu KK Sosek Malindo. Seperti saat ini, Biro pemerintahan Kalbar baru menangani pemahasan isu KK Sosek Malindo semenjak 2 tahun terakhir dari sebelumnya yang merupakan kegiatan dari BP2DT. Sedangkan BP2DT saat ini instansi nya sudah dibubarkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Drs. Dudi Nugraha (Kasubbag Pengelolaan Perbatasan, Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat) di Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Barat Pada tanggal 06 November 2018

<sup>6</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, pelaksanaan dari KK Sosek Malindo saat ini sudah mengalami penyederhanaan pembahasan dari sebelumnya sebanyak 8 bidang isu pembahasan, kini menjadi 3 bidang yakni; *pertama*, bidang kerjasama sosial budaya, *kedua*, bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan, *ketiga*, bidang keamanan dan kepengurusan perbatasan. Dalam setiap pertemuan KK Sosek Malindo, membahas isu-isu yang sudah tercantum dalam kertas kerja. sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. Dudi Nugraha (Kasubbag Pengelolaan Perbatasan, Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat) sebagai Narasumber penelitian ini:

Biro Pemerintahan hanya merupakan sekretariat saja. Pada dasarnya, kerjasama-kerjasama yang dilakukan kebanyakan hanya bersifat teknis. Jadi kita melihat dinas-dinas apa saja yang mempunyai isu urgent untuk dibahas di pertemuan KK Sosek Malindo.

Dalam teknis pelaksanaannya, program KK Sosek malindo melibatkan seluruh perangkat pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pemerintah daerah selaku penanggung jawab kegiatan KK Sosek Malindo di Kalimantan Barat mengkoordinir pejabat-pejabat kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Malaysia. Adapun pemerintah kabupaten yang terlibat sebelumnya sudah mengkoordinasikan mengenai isu-isu dan pembahasan dari perangkat desa, kecamatan, dan kelurahan yang berbatasan dengan Malaysia. Koordinasi *bottom-up* seperti ini dianggap sudah mewakili masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

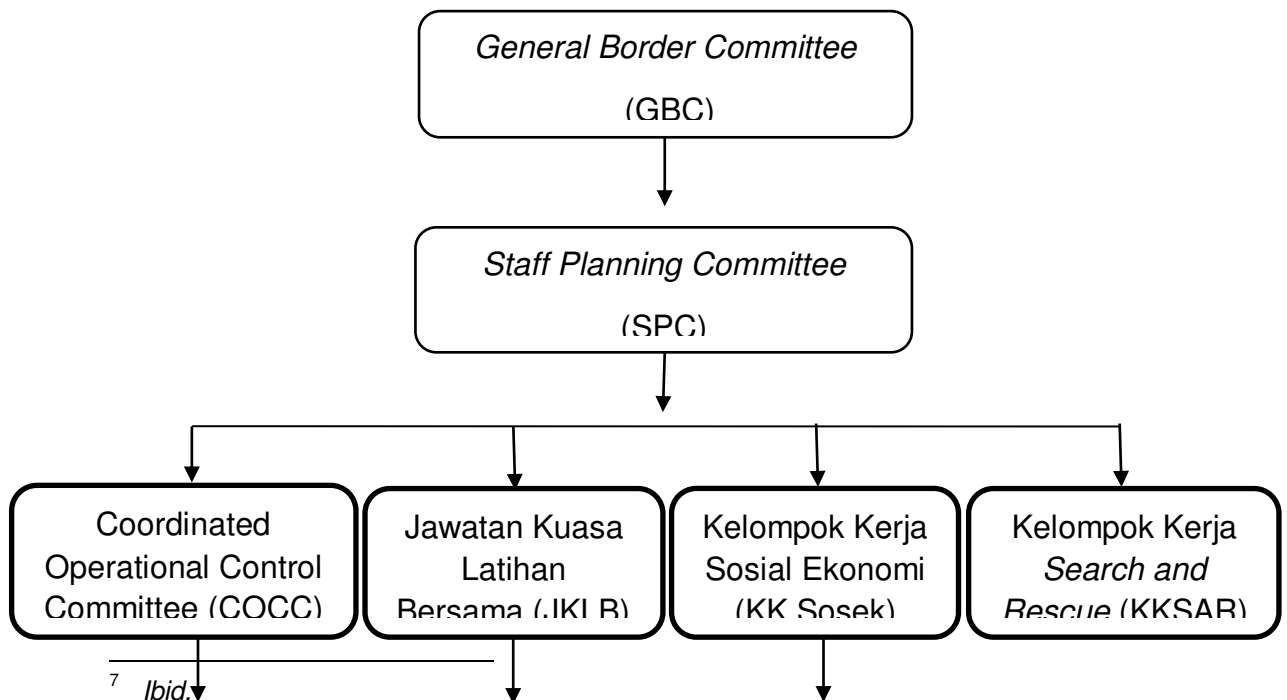
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang biasa yang dihadapi oleh delegasi pemerintah daerah Prov. Kalimantan Barat. Beberapa masalah diantaranya yang cukup krusial adalah pergantian kewenangan instansi yang cukup menyulitkan dilakukannya sinkronisasi data dan hasil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya

kesulitan bagi pejabat yang berwenang saat ini untuk mengevaluasi dan menyelaraskan program-program yang sudah dan akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selain itu, pelaksana kegiatan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat merupakan pejabat dinas-dinas tertentu yang bertindak sebagai pelaku diplomasi belum memiliki kemampuan dalam berdiplomasi dan kemahiran dalam perundingan. Berdasarkan pengakuan narasumber dalam penelitian ini Drs. Dudi Nugraha selaku salah satu perwakilan tim KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat yang menuturkan bahwa:

Salah satu yang menjadi kelemahan bagi delegasi Indonesia dalam pertemuan KK Sosek Malindo adalah kendala bahasa. Orang Malaysia sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, Sementara kita tidak demikian. Hal ini kadang sedikit menyulitkan bagi perwakilan-perwakilan Indonesia dalam pertemuan tersebut karena apabila tidak ditemukan kosa kata yang sepaham maka akan digunakan bahasa Inggris.<sup>7</sup>

Adapun struktur kegiatan GBC hingga Kelompok Kerja KK Sosek Malindo adalah sebagai berikut:

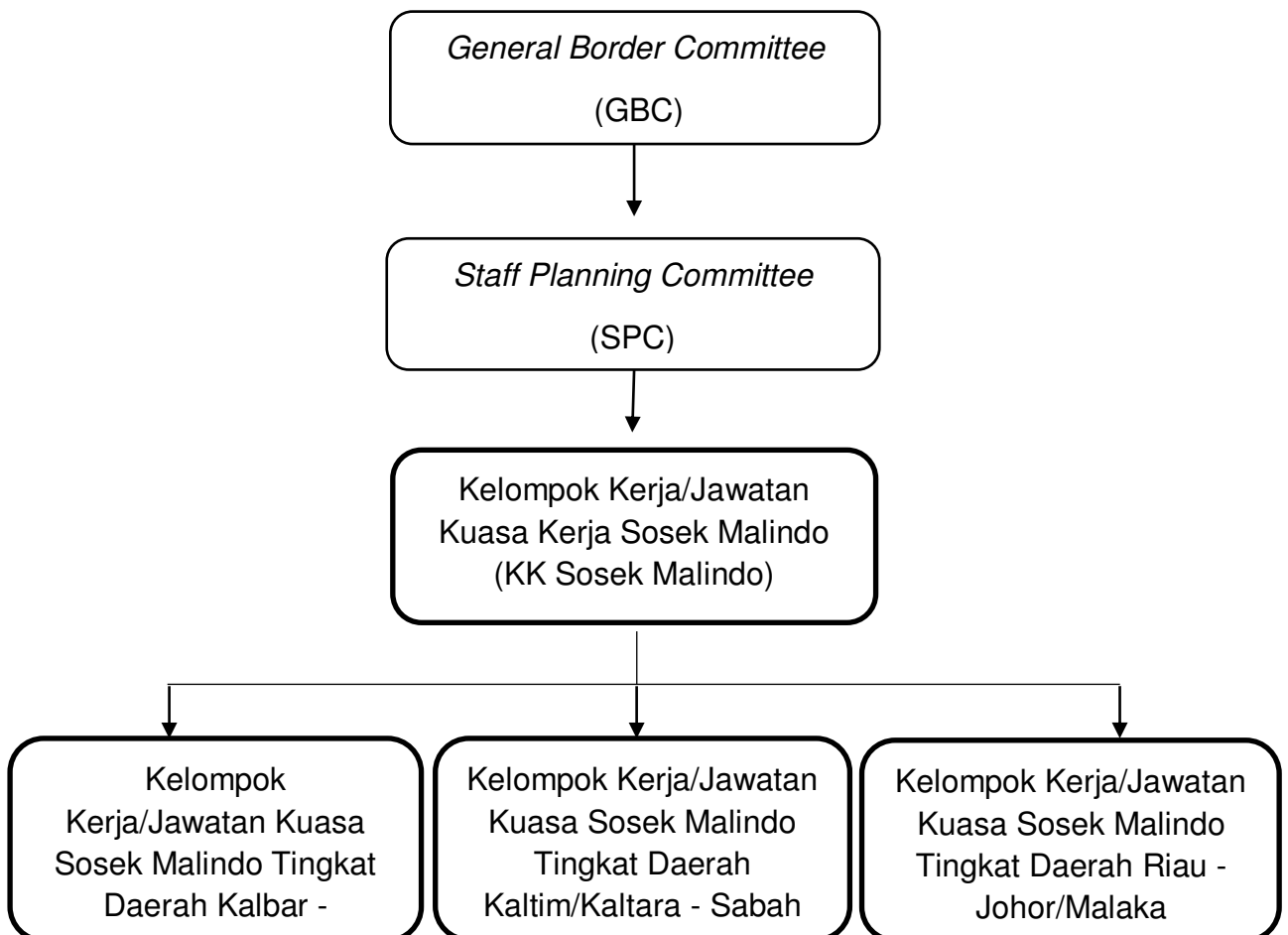
**Gambar 4.1 Struktur kegiatan *General Border Committee* (GBC) hingga Kelompok Kerja KK Sosek Malindo Tingkat Daerah**

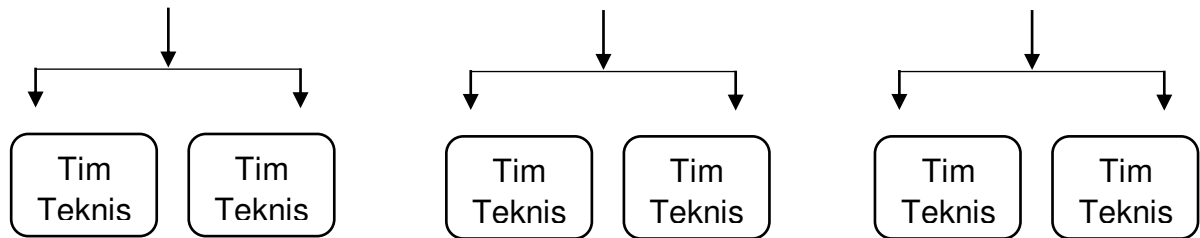




Sumber: Subdit Kerjasama Bilateral Dit. Kerjasama Internasional  
 Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan

**Gambar 4.2 Struktur kegiatan GBC tingkat pusat hingga Tim Teknis Kelompok Kerja KK Sosek Malindo Daerah**





Sumber: Bappeda Propinsi Kalimantan Barat

#### **4.1.2 Hasil Penelitian Dampak Program KK Sosek Malindo di Kalimantan Barat**

Seiring dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dengan program Nawacita yang salah satu isinya yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan dan pulau terpencil, secara tidak langsung saling mendukung pelaksanaan program KK Sosek Malindo yang memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan negara. Pembangunan berbagai infrastruktur, akses jalan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan lainnya semakin memudahkan kejasama antara Indonesia dan Malaysia khususnya di Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak. Sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan “perbatasan merupakan wajah Indonesia.”<sup>8</sup>

Pengaruh kegiatan KK Sosek Malindo tingkat daerah dalam peningkatan rasa saling percaya atau CBMs antar negara membuahkan dampak yang positif dalam setiap perkembangannya.

---

<sup>8</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dalam acara Pidato Kebangsaan di Jakarta pada tanggal Januari 2019.

Menurut Amitav Acharya, kerjasama internasional dalam aktivitas diplomasi pertahanan dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya bertujuan untuk menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka dalam kebijakan negara, saling transparansi dalam pengembangan kemampuan agar apa yang sedang dan telah dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lainnya.<sup>9</sup> Adanya peningkatan rasa saling percaya antara Indonesia dan Malaysia melalui program KK Sosek Malindo dibuktikan dengan selalu terselenggaranya pertemuan rutin tahunan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak semenjak dari pertama terbentuk hingga saat ini. Pertemuan yang konsisten antara perwakilan pemerintah Prov. Kalimantan Barat dan Pejabat Kuasa Negeri Sarawak yang merupakan pelaksana KK Sosek Malindo tingkat daerah setiap tahunnya selalu berjalan baik membahas perkembangan dan rencana-rencana kegiatan ke depan yang berkelanjutan sesuai dengan kertas kerja walaupun hubungan antara Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan memanas di level pemerintah pusat. Dengan demikian, KK Sosek Malindo tingkat daerah menjadi pertemuan yang paling konsisten dilaksanakan diantara semua kegiatan kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Suhaemi (Kasubbag Perekonomian, Bappeda Prov. Kalimantan Barat) menerangkan bahwa:

Program KK Sosek Malindo yang telah dilakukan memiliki dampak diantaranya adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tinggal diperbatasan Kalimantan Barat yang dapat diukur dari naiknya pendapatan perkapita di

---

<sup>9</sup> L.A. Swatuk, L. d., 2013, “*Regional Approaches to Security In The Third World dalam The South at the End of the Twentieth Century*” dalam Pergeseran KEkuatan di Asia Timur dan Konsekuensi bagi ASEAN; Persepsi Ancaman dan Kerjasama Keamanan Regional, 2013, Analisis CSIS, hlm. 343.

kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Negara Malaysia.<sup>10</sup>

Terbukti, Kabupaten Sanggau memiliki pendapatan perkapita tertinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya dikarenakan Kabupaten Sanggau merupakan jalur lintas perbatasan negara yang paling sering digunakan melalui PLBN Entikong Kab. Sanggau–Tebedu Sarawak. Bukti lainnya berdasarkan temuan peneliti dalam data sekunder yang didapat dari dari kantor Pelayanan Bea dan Cukai Entikong melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa nilai ekspor yang berasal dari Kalimantan Barat melalui PLBN Entikong pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp 100.387.357.175,-** dan meningkat pada tahun 2016 menjadi **Rp 149.376.448.928,-**. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah **nilai impor yang dilakukan** dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) jauh lebih tinggi, yakni sebesar **Rp 171.793.920.000,- dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 270.791.872,-**.<sup>11</sup>

**Data lain yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan** masyarakat Prov. Kalimantan Barat secara keseluruhan adalah besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh pengeluaran, dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Jika makin besar proporsinya, maka menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan penduduk. Begitu pula sebaliknya, jika proporsi tersebut mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan penduduk menurun (Hukum Engle). Adapun pengeluaran rata-rata penduduk Kalimantan Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Suhaemi (Kasubbag Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalimantan Barat) di Kantor Bappeda Prov. Kalimantan Barat pada tanggal 28 November 2018

<sup>11</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, dalam [www.disperindag.kalarprov.go.id](http://www.disperindag.kalarprov.go.id), diakses pada 23 Desember 2018

diterima masyarakat. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan daerah Kalimantan Barat pada tahun 2017 sebesar Rp 1.186.868,- per kapita sebulan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp 848.388,- proporsinya sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan 51,50% dan pengeluaran non makanan 48,50%.<sup>12</sup>

Berdasarkan data sekunder penelitian yang didapat, pada pertemuan KK Sosek Malindo Kalimantan Barat – Sarawak ke-34 di Sibu Sarawak pada Oktober 2018 yang lalu telah mencapai kesepakatan bersama mengenai *Grand Opening* PLBN Badau (Kab. Kapuas Hulu) – Lubuk Antu (Sarawak) dan PLBN Aruk (Kab. Sambas) – Biawak (Sarawak) dapat dilaksanakan tanpa menunggu *Border Crossing Agreement* (BCA) ditandatangani. Karena sejatinya, perlintasan perbatasan dinilai menjadi kebutuhan masyarakat antar kedua Negara sehingga KK Sosek Malindo harus dapat saling menguntungkan bagi kedua negara tersebut. Selain itu, dalam pertemuan KK Sosek Malindo Kalimantan Barat – Sarawak ke-34 tersebut juga membahas pelintasan kendaraan pribadi, angkutan, dan barang sebagaimana pernyataan dari Abang Muhammad Nasir (Bupati Kab. Kapuas Hulu) yang turut hadir dalam pertemuan tersebut:

Kemudian pelintasan barang dan kendaraan baik untuk kehidupan sosial masyarakat perbatasan maupun yang angkat berkaitan dengan pelintasan kendaraan dan orang dalam bidang pariwisata. Selama ini belum ada aturan yang berkaitan dengan pengakutan kendaraan orang sakit, itu penting menjadi perhatian bersama.<sup>13</sup>

Memang selama ini, cukup banyak masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Barat sendiri dan terlebih warga yang tinggal didaerah-daerah perbatasan yang lebih sering mengutamakan pengobatan ke rumah sakit yang berada dinegara tetangga tersebut. Selain karena faktor jarak yang memang lebih

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, *op.cit.*, hlm. 33.

<sup>13</sup> Sahirul Hakim, "Bupati A. M. Nasir Hadiri Sidang Sosek Malindo di Malaysia", *Tribun Pontianak*, Pontianak, 1 November 2018, hlm. 4.

dekat dan lebih mudah diakses, alasan kualitas pengobatan di klinik dan rumah sakit-rumah sakit di Malaysia juga dipercayai lebih efektif dalam menyembuhkan. Hal tersebut saat ini juga didukung dengan mudahnya akses jalan antar daerah hingga ke pelosok negeri yang sudah dibangun pemerintah sehingga lebih memudahkan masyarakat yang ingin pergi ke Malaysia. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya angkutan transportasi baik yang resmi maupun non resmi (taksi gelap) yang beroperasi.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pembahasan Implementasi Program KK Sosek Malindo**

Segala kegiatan yang menyangkut hubungan luar negeri antar negara dengan negara lain merupakan suatu bentuk pelaksanaan diplomasi. Diplomasi menjadi salah satu faktor penyebab baik buruknya hubungan suatu negara terhadap negara tetangga, regional, maupun internasional. Kerjasama antar negara membuktikan bahwa adanya suatu interaksi internasional yang dilakukan oleh negara. Beberapa pakar mendefinisikan “diplomasi” secara berbeda. Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan negara berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan terhadap negara-negara jajahannya. Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Melalui perwakilan resmi negara dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional yang lebih luas maupun secara khusus, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobbying*, kunjungan, pertemuan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi: Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 3-4.

Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan dan kepentingan. Begitu juga dalam meningkatkan kualitas kehidupan suatu negara dan menjaga kedaulatannya dari berbagai ancaman hingga dapat tetap stabil, pasti akan melakukan interaksi dengan negara lain. Salah satunya berupa kerjasama dengan negara terdekat atau bertentangan seperti halnya hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia–Malaysia.

Berdasarkan penjelasan Shoelhi Mohammad dalam bukunya berjudul “Diplomasi: Praktek Komunikasi Internasional” yang menjelaskan tentang berbagai ragam diplomasi, penyelenggaraan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia mulai dari program GBC sebagai rantai kerjasama tingkat tertinggi hingga pelaksanaan KK Sosek Malindo tingkat daerah dapat dikategorikan sebagai Diplomasi Boejuis–Sipil. Jenis diplomasi ini merupakan upaya kerjasama yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan–permasalahan dengan mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (*win-win solution*). Hal ini dikarenakan kerjasama bilateral dalam program KK Sosek Malindo memiliki tujuan bersama dalam menangani permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan antar kedua negara.

Dalam teori *international regime*, masyarakat internasional memerlukan adanya interaksi dan saling keterkaitan antara masyarakat negara tetangga yang tidak hanya bergerak ke internal negara mereka saja. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal dikawasan perbatasan darat suatu negara yang memiliki keterkaitan suku, ras, agama, sosial, budaya, dan kesamaan lainnya. Sebagai negara yang bertetangga, interaksi antara kedua negara sangat diperlukan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan kedua negara di Kalimantan, terlebih lagi

daerah ini terdapat perbatasan darat yang membuat interaksi kedua negara semakin intens dilakukan.

Dalam teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Krasner terdapat dua akar teori utama, yaitu realisme struktural dan pendekatan isu. Realisme struktural lebih banyak membahas masalah kapabilitas unit-unit yang dimiliki negara agar dapat bekerja sama dengan baik dalam rezim. Sementara pendekatan isu membahas posisi negara yang terus berubah sesuai dengan isu yang dibahas dalam rezim.<sup>15</sup> Negara memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap isu tergantung pada pengaruh negara yang bersangkutan dalam isu tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai struktur program KK Sosek Malindo akan lebih relevan menggunakan pendekatan realisme struktural. Kedua negara dalam program KK Sosek Malindo ini memiliki satu isu yang sama yakni mengenai kesejahteraan di kawasan perbatasan sehingga akan kurang relevan jika menggunakan pendekatan isu. Dalam paradigma realisme, negara merupakan aktor utama dan terpenting dalam sebuah kerjasama internasional. Sejak dimulainya kerjasama forum GBC hingga pelaksanaan KK Sosek Malindo tingkat daerah, pemerintah selalu bertindak sebagai aktor tunggal dalam kerjasama ini. Hingga saat ini, pemerintah masih belum melibatkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan KK Sosek Malindo dengan pelaku-pelaku diluar pemerintahan (*non state actors*).

Begitu pula dengan kegiatan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak. Kegiatan diplomatik ini dilakukan mulai dari pemerintahan pusat hingga ke tingkat daerah. Adapun pemerintah pusat yang bertugas dalam melaksanakan program KK Sosek Malindo saat ini adalah Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan

---

<sup>15</sup> S. D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables", *International Organization*, Volume 36, Nomor 2, 1986, hlm. 190.

pelaksana program KK Sosek Malindo untuk tingkat daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat adalah Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat. Perbedaan struktur tersebut menunjukkan bahwa kurang baiknya koordinasi birokrasi pemerintah antara pengurus KK Sosek Malindo tingkat pusat dan pengurus KK Sosek Malindo tingkat daerah. KK Sosek Malindo tingkat daerah memang terlebih dahulu dibentuk dan lebih rutin dalam penyelenggaraannya dibandingkan dengan pertemuan KK Sosek Malindo tingkat pusat. Kedua perihal tersebut juga sesungguhnya berada dibawah program GBC yang dikomandoi Kementerian Pertahanan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 5 ayat (1) UU 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa:

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.<sup>16</sup>

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni pada pada Pasal 10 ayat (3) huruf a yang menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah bidang politik luar negeri. Sedangkan bidang-bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang mengatur kewenangan kabupaten/kota. Sedangkan bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperlukan adanya konsultasi dan koordinasi dengan pihak kementerian yang berkaitan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan KK Sosek Malindo yang merupakan salah satu kerjasama internasional khususnya terkait dengan perjanjian

---

<sup>16</sup> Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 4 dan Pasal 5.

kerjasama KK Sosek Malindo tingkat daerah harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat yang dalam ini adalah Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator KK Sosek Malindo tingkat pusat dan Kementerian Pertahanan selaku penanggung jawab seluruh program kegiatan dibawah naungan GBC.

Menurut David Crikemans dalam bukunya yang berjudul “*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*” (2008), Pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan diplomasi suatu Negara seperti yang dilakukan pemerintah daerah dalam kegiatan KK Sosek Malindo Tingkat daerah merupakan pelaksanaan *paradiplomacy*. Dalam menjalankan aktifitas diplomasi, aktor sub-nasional ini dapat mendirikan perwakilan dan memiliki kontak formal maupun informal, permanen maupun *ad hoc*, dengan entitas pemerintah maupun swasta asing, dengan tujuan memajukan kepentingan sosial ekonomi atau politik maupun dimensi kepentingan lainnya, yang sesuai dengan amanat konstitusional atau kompetensi yang dimilikinya.<sup>17</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas atau lapisan *paradiplomacy* meliputi tiga bidang utama yaitu politik, ekonomi dan budaya sebagaimana pelaksanaan KK Sosek Malindo yang pada awal terbentuknya memang berdasarkan kepentingan kesejahteraan.

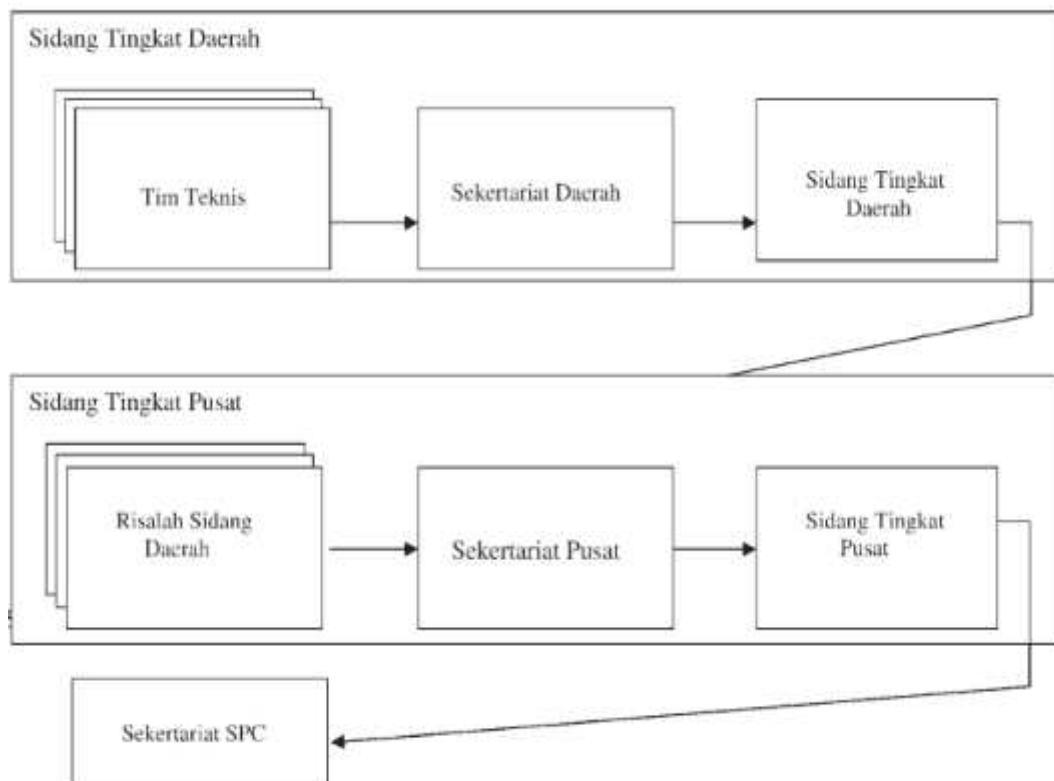
Adapun kedudukan pemerintah daerah dalam kerjasama internasional terkait dengan kerjasama KK Sosek Malindo dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama internasional, namun kedudukannya tidak bisa dipandang sebagaimana layaknya subjek

---

<sup>17</sup> Noé Cornago, “*Exploring the Global Dimensions of Paradiplomacy Functional and Normative Dynamics in the Global Spreading of Subnational Involvement in International Affairs*, (Oktober, 2000), dalam: <http://www.forumfed.org/en/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-int-cornago.pdf>, diakses pada 21 Januari 2019.

hukum internasional. Tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat. Sebagaimana dalam konteks hukum internasional, tanggung jawab dalam setiap perjanjian kerjasama internasional tetap berada di pemerintah pusat.

Pertemuan KK Sosek Malindo dilaksanakan setiap tahunnya dimulai dari KK Sosek Malindo tingkat daerah, kemudian KK Sosek Malindo tingkat pusat, hingga akhirnya dibawa dalam pertemuan tingkat tertinggi yakni GBC. KK Sosek Malindo sendiri sudah berjalan selama 34 tahun yang dimulai pada tahun 1984 yang memang lebih terperinci membahas sosial dan perekonomian diperbatasan kedua negara. Sedangkan pertemuan GBC yang merupakan induk dari forum kerjasama mengenai perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sudah lebih lama berjalan yang dimulai semenjak tahun 1964.



**Gambar 4.3 Mekanisme koordinasi pelaksanaan KK Sosek Malindo**  
Sumber: dikutip dari berbagai sumber, diolah peneliti.

Selama ini kerjasama bilateral KK Sosek Malindo masih dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang sesuai dengan bagian dan struktur lembaga yang berwenang dalam menangani program ini. Pada dasarnya, diplomasi sendiri merupakan suatu alat politik luar negeri suatu negara sebagai upaya pemerintah dalam mengelola hubungan dengan negara lain. Akan tetapi, dalam perkembangan konsep-konsep diplomasi yang merupakan jalu komunikasi dan ide-ide mengenai demokrasi semakin meluas. Peran aktor-aktor yang bukan dari pemerintahan (*non state actors*) juga memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan diplomasi itu sendiri. Diplomasi memang menjadi sebuah upaya yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Namun, diplomasi memiliki keterkaitan erat dengan manajemen hubungan antara aktor negara dan aktor-aktor selain negara.<sup>18</sup>

Saat ini, pelaksanaan program ini masih belum melibatkan pihak-pihak dari luar pemerintah, padahal keterlibatan pihak ketiga ini sesuai dengan konsep *open diplomacy* dan *new diplomacy* yang memang memberikan ruang yang luas kepada pihak-pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam berdiplomasi. Apalagi dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuka kesempatan besar bagi aktor-aktor selain pemerintah negara (*non state actors*) untuk turut dapat menjalankan berbagai kegiatan diplomatik antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Terlebih kegiatan-kegiatan utama masalah sosial dan perekonomian antara Indonesia dan Malaysia dipergeser ke Kalimantan Barat lebih banyak dilakukan oleh aktor-aktor swasta maupun individu dari kedua negara tersebut. Mengingat program KK Sosek Malindo adalah kegiatan yang paling rutin mengadakan pertemuan antara Indonesia dan Malaysia dalam membahas berbagai persoalan perbatasan kedua negara tersebut. Oleh karena itu, KK Sosek

---

<sup>18</sup> Minix, Dean dan Sandra M. Hawley, *Global Politics*, (Belmont : Wadsworth Publishing Company), hlm. 282.

Malindo memiliki peran yang sangat strategis dan berkesempatan besar untuk turut melibatkan aktor-aktor selain negara.

Selain itu, seringnya perpindahan kewenangan lembaga/ instansi dalam menangani program KK Sosek Malindo baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat daerah dan mudahnya pergantian pejabat dan anggota dari program KK Sosek Malindo secara terus menerus karena jabatan birokratis yang berjangka waktu tertentu, diperlukan adanya perhatian khusus karena hal tersebut menyebabkan kurangnya informasi, pengalaman dan pengetahuan dari anggota. Padahal isu-isu yang bergulir dan dibicarakan membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang luas dalam memahami setiap isu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya agar dapat menyusun dan menjadikan kegiatan ini secara berkelanjutan (*sustainable*).

Selain merupakan sebagai instrumen diplomasi, KK Sosek Malindo juga merupakan penyelenggaraan pertahanan negara bagi Indonesia. Apalagi jika melihat struktur kegiatan yang mana KK Sosek Malindo berada dibawah program GBC yang menjadi salah satu agenda Kementerian Pertahanan. Tidak hanya dari segi struktural penyelenggaraan saja, secara teoritis juga dijelaskan oleh Cottey dan Foster yang sepakat bahwa perlu adanya suatu perluasan pengertian dan makna dalam mendefinisikan diplomasi pertahanan saat ini. Jika sebelumnya konsep diplomasi pertahanan hanya menekankan pada aspek militeristik menurutnya tidak lagi dapat merepresentasikan secara keseluruhan mengenai diplomasi pertahanan.<sup>19</sup>

Dalam disiplin ilmu pertahanan, dipelajari tentang bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai,

---

<sup>19</sup> Cottey, Andrew dan Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: The New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 46.

perang, dan saat sesudah perang guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional.<sup>20</sup> Sementara dimensi ancaman non militer memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur, ketimpangan sosial, ketidakmerataan ekonomi, nasionalisme hingga ancaman tindakan kriminal lintas negara di wilayah perbatasan yang merupakan gerbang terdepan negara seringkali terjadi seperti dalam bentuk perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan kayu, perdagangan manusia, pelintas batas ilegal, terorisme, pencurian ikan serta penetrasi ideologi asing. Permasalahan tersebut perlu ditangani dengan behavior nirmiliter secara tepat dan benar melalui pembangunan wilayah perbatasan oleh TNI dan *stakeholder* secara sinergis dan terintegrasi sehingga dapat menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Implementasi KK Sosek Malindo tingkat daerah sebagai upaya pertahanan negara menjadi sangat penting untuk diberikan perhatian serius. Penyelenggaraan KK Sosek Malindo ini menjadi perisai pertahanan Indonesia khususnya dalam menghadapi ancaman berdimensi nirmiliter dikawasan perbatasan negara. Apalagi dalam kondisi Negara sedang damai (keadaan tidak berperan), ancaman nirmiliter menjadi ancaman utama bagi suatu negara. Pelaksanaan kegiatan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak saat ini lebih berfokus terhadap tiga bidang pembahasan, yakni; pertama, bidang kerjasama sosial dan budaya, kedua, bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan, ketiga, bidang keamanan dan kepengurusan perbatasan. Dilihat dari ketiga bidang tersebut, tentu saja sangat berkaitan erat dengan

---

<sup>53</sup> Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). hlm. 29.

pertahanan negara. Indonesia yang sejatinya dituntut untuk dapat mempertahankan kehidupan sosial warna negaranya dan kebudayaannya yang kaya raya. Indonesia dan Malaysia cukup sering bersitegang mengenai permasalahan budaya. Selain itu, Indonesia dan Malaysia hampir tidak pernah jeda membahas sengketa perbatasan kedua negara yang selalu menjadi polemik bagi hubungan keduanya. Ditambah lagi isu perekonomian dan keamanan bersama yang sering dilakukan melalui jalur-jalur perbatasan darat khususnya Kalimantan Barat – Sarawak.

Dengan adanya program KK Sosek Malindo yang membahas bidang tersebut secara rutin dan berkelanjutan, diharapkan nantinya dapat menjadi instrument pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia yang dapat mengatasi berbagai ancaman secara komprehensif khususnya di wilayah-wilayah perbatasan kedua negara. Karena negara harus mampu melakukan upaya mempertahankan diri (*defense*) dengan mengatasi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan akan eksistensi negara tersebut. Hal ini tentu saja akan menjadi lebih mudah karena Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama bilateral yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan mulai dari kegiatan GBC ditingkat pusat hingga pelaksanaan KK Sosek Malindo di tingkat daerah. Pelaksanaan KK Sosek Malindo merupakan kegiatan yang multidimensi, karena tidak hanya menyangkut masalah sosial, perekonomian, pembangunan, hubungan internasional, dan berbagai bidang perspektif lainnya. Melainkan juga merupakan salah satu upaya Indonesia dalam bidang pertahanan negara.

#### **4.2.2 Pembahasan Dampak Program KK Sosek Malindo di Kalimantan Barat**

Berdasarkan golongan terbentuknya garis perbatasan negara, perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan termasuk dalam klasifikasi morfologis *Artificial*

*Boundarie*, yaitu wilayah batas negara yang dibuat oleh manusia<sup>21</sup>. Garis batas negara Indonesia dan Malaysia memang merupakan warisan kolonial yang telah terbentuk semenjak masa penjajahan keduanya. Sedangkan klasifikasi secara fungsionalnya, perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan digolongkan dalam dua kategori sekaligus yaitu *Subsequent Boundaries* dan *Superimposed Boundaries*.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan terbentuknya perbatasan tersebut setelah adanya *cultural landscape* (bahasa, suku, ras dan agama) dan setelah adanya perundingan dan kesepakatan bersama antar dua negara. Adanya keserumpunan yang dipisahkan oleh garis batas tidak membuat kehidupan masyarakat kedua negara menjadi terpisah. Keterkaitan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari masih tetap terus berjalan dengan saling melakukan interaksi dan kerjasama. Kegiatan dari akar rumput seperti inilah yang lebih mendasari pemerintah kedua negara untuk melakukan kerjasama-kerjasama berdasarkan tatacara diplomatis yang berlaku dalam hubungan internasional.

Konsep diplomasi pertahanan lebih sering menggunakan metode *win-win solution* dengan cara yang lebih *soft power* untuk membangun kemitraan dengan semua pihak secara transparansi atau keterbukaan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan bagi pihak lain. Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan yang baik, lebih jauh lagi dapat saling melakukan kerjasama, dan yang terpenting adalah dapat meningkatkan kepercayaan.<sup>23</sup> Dalam konsep diplomasi pertahanan, ada tiga karakter utama dari

---

<sup>21</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 37.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 36.

<sup>23</sup> Rodon Pedrason, "ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community", *Unpublished Dissertation* (Heidelberg: Universitat Heidelberg, 2015), hlm. 15.

diplomasi pertahanan suatu negara. Adapun ketiga konsep tersebut, yaitu; *defense diplomacy for confidence building measures (CBMs)*, *defense diplomacy for defense capabilities*, dan *defense diplomacy for defense industry*.<sup>24</sup>

Dalam diplomasi pertahanan untuk membangun/meningkatkan rasa saling percaya, pada prinsipnya dalam tataran negara bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepercayaan antar kedua belah pihak negara, menjaga hubungan baik kedua negara, dan mengurangi perasaan terancam akan adanya mispersepsi dan konflik, serta merupakan usaha penyelesaian suatu konflik secara damai. Secara operasional, diplomasi pertahanan dalam rangka CBMs ini dapat dilakukan melalui kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, pertukaran informasi strategis, mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, pertukaran perwira dalam pendidikan militer, latihan bersama, kesepakatan dalam kerjasama atau nota kesepahaman. Keberhasilan hubungan diplomasi pertahanan yang baik dalam hal CBMs tentunya akan membentuk kondisi lingkungan yang saling mempercayai antar pihak tanpa saling mencurigakan.

Dalam pelaksanaan KK Sosek Malindo, terbukti bahwa kegiatan ini membawa efek positif dalam membangun CBMs antara Indonesia dan Malaysia. Program KK Sosek Malindo merupakan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin baik ditingkat pusat maupun di daerah. Sebagai negara bertetangga yang banyak memiliki persamaan, tak jarang Indonesia dan Malaysia mengalami berbagai ketegangan dalam berbagai hal. Walaupun demikian, pertemuan KK Sosek Malindo terus berjalan secara konsisten setiap tahunnya demi membahas tujuan-tujuan bersama dalam membangun wilayah perbatasan antar kedua negara. Bahkan, pertemuan KK Sosek Malindo di tingkat daerah

---

<sup>24</sup> Cottey, Andrew dan Anthony Forster, *Chapter 1: Strategic Engagement: Defense Diplomacy as a means of Conflict Prevention*, (New York: Routledge, 2004), hlm. 15

menjadi forum yang paling rutin mengadakan pertemuan secara rutin dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kerjasama bilateral lainnya antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa KK Sosek Malindo telah berhasil menumbuhkan dan meningkatkan rasa saling percaya (CBMs) antar kedua negara ini.

Keberhasilan KK Sosek Malindo dalam meningkatkan rasa saling percaya (CBMs) tidak hanya dilevel antar pemerintah saja (*Government to Government*), akan tetapi dampak adanya peningkatan CBMs juga turut dirasakan dilevel masyarakat (*people to people*). Interaksi masyarakat kedua negara, khususnya dalam hal sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan juga tetap berlangsung sebagaimana biasanya walaupun keadaan dilevel pemerintah pusat terkadang sering bersitegang.

Selama ini, masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat lebih dominan menggantungkan hidup kepada Malaysia. Mulai dari bahan makanan, kebutuhan sandang, kesehatan, dan bahkan hiburan sekalipun. Akan tetapi, saat ini keadaan tersebut sudah mulai berubah. Kemajuan pembangunan dan perkembangan di wilayah perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia, telah mengubah ketergantungan hidup masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan terhadap Malaysia. Alasan akses jalan dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama keberlangsungan hidup tersebut selama bertahun-tahun.

Keberlangsungan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat – Sarawak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Kalimantan Barat

menunjukkan bahwa WNI yang tinggal Kab. Sanggau memiliki peningkatan pendapatan perkapita tertinggi diantara Kabupaten lainnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena PLBN Entikong Kab. Sanggau lebih dominan dimanfaatkan sebagai jalur lintas keluar masuk negara jika dibandingkan dengan Pos Lintas di daerah lainnya.

Selama ini, pembahasan KK Sosek Malindo dalam membahas efektivitas penggunaan PLBN membuahkan hasil. Pertemuan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat – Sarawak kini berfokus terhadap PLBN dan pos lintas lainnya yang masih belum menjadi prioritas. Hal ini bertujuan demi tercapainya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Pos Lintas Batas dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan Malaysia khususnya yang tinggal di daerah perbatasan kedua negara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK Sosek Malindo) di Kalimantan Barat Ditinjau dari Perspektif Diplomasi Pertahanan Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia–Malaysia (KK Sosek Malindo) di Kalimantan Barat Kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang terkait dengan persoalan perbatasan telah dimulai sejak tahun 1967 yang dimulai dalam bidang keamanan di daerah-daerah perbatasan kedua negara. Kerjasama inipun kemudian berkembang hingga mencakupi bidang-bidang lain seperti: politik, sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, terbentuklah forum *General Border Committee* (GBC) yang merupakan induk kerjasama antar kedua negara yang kemudian bersepakat untuk membentuk program kelompok-kelompok kerja sehingga melahirkan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK Sosek Malindo). Demi keefektifan dan lebih efisiennya penyelenggaraan, maka dikuasakanlah kewenangan program KK Sosek Malindo kepada pemerintah daerah yang berbatasan langsung. Yakni Kalimantan Barat-Sarawak, Kalimantan Utara-Sabah, Riau-Malaka-Johor Bahru.

Dari mulai terbentuknya forum GBC hingga sampai dengan saat ini masih dikomandoi Kementerian Pertahanan yang bersekretariat di Dit. Kerjasama Internasional Ditjen. Strategi Pertahanan. Sedangkan untuk kepengurusan KK Sosek Malindo tingkat pusat sudah mengalami perpindahan kewenangan dari yang sebelumnya dibawah kewenangan Asisten Teritorial Panglima TNI

dialihkan kepada Kementerian Pertahanan hingga kemudian diamanahkan ke Kementerian Dalam Negeri yang bersekretariat di Dirjen. Biro Administrasi Kewilayahan (BAK). Demikian pula dengan lembaga pelaksana KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak saat ini bersekretariat di Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat dari yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh BP2DT dan Bappeda Prov. Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah tingkat daerah Prov. Kalimantan Barat dan pemerintah Sarawak Malaysia selalu mengadakan pertemuan rutin untuk mengenai KK Sosek Malindo disetiap tahunnya. Adapun isu-isu yang diperundingkan dalam pertemuan tersebut selalu sesuai dengan kertas kerja yang terlebih dahulu dibahas oleh tim teknis yang sesuai dengan kedinasan/lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan bidang isu yakni antara lain pembahasan dalam bidang kerjasama sosial budaya, bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan, serta bidang keamanan dan kepengurusan perbatasan. Keseluruhan implementasi KK Sosek Malindo ini dilaksanakan oleh pemerintah saja (*state actors*) dan masih belum melibatkan aktor-aktor selain negara (*non state actors*).

## 2. Kesimpulan dari pembahasan dampak dari kegiatan KK Sosek Malindo di Kalimantan Barat – Sarawak

Implementasi program KK Sosek Malindo yang merupakan salah satu bentuk kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia yang dapat meningkatkan CBMs dan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan tetap berlangsungnya pertemuan-pertemuan dan pembahasan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak secara rutin dan konsisten disetiap tahunnya, meskipun pada saat hubungan antara Indonesia dan Malaysia sedang memanas dilevel nasional. Walaupun bidang pembahasan dalam pertemuan tersebut terkadang berkenaan

dengan isu-isu yang sedang bermasalah di level daerah maupun nasional. Peningkatan rasa saling percaya tidak hanya dikalangan pemerintah kedua negara saja, melainkan juga terjadi dalam kehidupan masyarakat bawah khususnya di wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia.

Selain peningkatan CBM, program KK Sosek Malindo juga mempengaruhi peningkatan kesejahteraan diperbatasan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kalimantan Barat khususnya di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Ditambah dengan kebijakan program Nawacita pemerintah pusat yang membangun Indonesia dari pinggiran menjadikan pembangunan dan kesejahteraan semakin merata sehingga kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Sehingga Warga Negara Indonesia yang tinggal didaerah perbatasan negara tidak menggantungkan hidupnya dari negara tetangga lagi.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK Sosek Malindo) di Kalimantan Barat Ditinjau dari Perspektif Diplomasi Pertahanan Indonesia yang dilakukan peneliti, maka peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam dunia akademis dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

### **5.2.1 Rekomendasi Teoritis**

Rekomendasi teoritis yang peneliti sarankan untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya penelitian lebih dalam dan kompleks mengenai kegiatan-kegiatan mulai dari GBC, SFC, KK Sosek Malindo tingkat pusat, dan KK Sosek Malindo tingkat daerah dari ketiga Provinsi yang bersangkutan agar dapat dilakukan analisa dan evaluasi mengenai imlementasi kegiatan yang telah

dilaksanakan sehingga nantinya dapat menyiapkan rencana kegiatan selanjutnya yang berkelanjutan (*sustainable*). Dalam bidang disiplin ilmu pertahanan, diharapkan dapat melakukan kajian-kajian ilmiah dari berbagai perspektif ilmu pertahanan, sehingga kajian teoritis mengenai pelaksanaan KK Sosek Malindo menjadi lebih komprehensif dalam berbagai bidang pertahanan.

Hasil-hasil penelitian dari berbagai perspektif disiplin ilmu tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan analisa saran dan rencana yang konstruktif terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia ke depan. Rekomendasi teoritis tentunya sangat diharapkan untuk dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam berbagai bidang disiplin ilmu dalam dunia akademis.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktik**

Dalam rekomendasi praktik, peneliti memberikan saran terhadap pelaksanaan program KK Sosek Malindo untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

#### **1. Saran Kepada Pemerintah Tingkat Pusat**

Peran pemerintah pusat yang dalam hal ini dikuasakan dibawah Kementerian Pertahanan selaku koordinator pelaksanaan GBC sebagai induk dari program-program Kelompok Kerja harus dapat mengkoordinir lembaga-lembaga dan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang bernaung dibawah GBC. Kesenambungan gagasan dan isu-isu yang terkait, serta penyelarasan program-program kegiatan sangat diperlukan sehingga setiap pertemuan tahunan dengan pihak Malaysia menghasilkan program lanjutan yang *sustainable*. Karena dalam pelaksanaan kerjasama internasional, pemerintah pusat menjadi penanggung jawab seluruh rangkaian kegiatan yang

dilakukan walaupun pelaksanaan diplomasi tersebut juga dilakukan pemerintah daerah.

Diperlukan adanya konsistensi bagi birokrat yang menangani sehingga dapat memahami latar belakang dan keberlangsungan dari perkembangan-perkembangan dari setiap pertemuan kegiatan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, birokrat Indonesia yang ditunjuk menjadi diplomat juga harus dapat meningkatkan kemampuan diplomasi dan bernegosiasi demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

## 2. Saran kepada Pemerintah Tingkat Daerah

Terkait dengan kedudukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka perlu adanya penambahan substansi kedudukan Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional. Dengan harapan akan dapat memperjelas kedudukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional mengingat kerjasama internasional yang dilakukan daerah dilakukan atas nama negara yang merupakan bagian dari negara kesatuan.

Dalam pelaksanaan program KK Sosek Malindo Kalimantan Barat–Sarawak, pemerintah daerah dapat mengkoordinir dan melibatkan semua lembaga, instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak-pihak swasta, akademisi dan berbagai aktor-aktor selain negara (*non state actors*) lainnya yang terkait dengan isu-isu pembahasan dalam setiap pertemuan KK Sosek Malindo Kalimantan Barat–Sarawak. Sehingga kegiatan-kegiatan diplomatis bagi Indonesia dan Malaysia lebih efektif dan efisien. Selain itu, secara birokrasi pemerintah daerah harus

dapat mempersiapkan delegasi pejabat yang mempunyai kredibilitas yang mumpuni dalam berdiplomasi dalam kegiatan ini.